



BUPATI TANAH BUMBU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah bahwa Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyusutan arsip merupakan kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan selaku pencipta dan pengelola arsip;
- c. bahwa adanya instrument pengawasan dari Arsip Nasional Republik Indonesia agar tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip Lembaga-Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53); Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas & Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 39);

10. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :      PERATURAN            BUPATI            TENTANG            PEDOMAN  
   PENYUSUTAN ARSIP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
10. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
11. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

12. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
13. Pencipta Arsip adalah lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi, perusahaan, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.
14. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
15. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
16. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
17. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

## Pasal 2

Pedoman Penyusutan Arsip merupakan acuan bagi Pencipta Arsip dalam melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip.

## Pasal 3

Penyusutan Arsip meliputi kegiatan:

- a. pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
- b. pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah.

## Pasal 4

Penyusutan Arsip dilakukan oleh Pencipta Arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip.

## BAB II PEMINDAHAN ARSIP

### Pasal 5

- (1) Pemindahan Arsip Inaktif dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip.
- (2) Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. penyeleksian Arsip Inaktif;
  - b. pembuatan daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan; dan
  - c. penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan.

### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai dengan prosedur pemindahan Arsip Inaktif.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PEMUSNAHAN ARSIP

### Pasal 7

- (1) Pemusnahan arsip menjadi tanggung jawab pimpinan Pencipta Arsip.
- (2) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap arsip:
  - a. tidak memiliki nilai guna;
  - b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
  - c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
  - d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
- (3) Dalam hal arsip belum memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retensinya ditentukan kembali oleh pimpinan Pencipta Arsip.

### Pasal 8

Prosedur pemusnahan arsip berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembentukan panitia penilai arsip;
- b. penyeleksian arsip;
- c. pembuatan daftar arsip usul musnah oleh Arsiparis/Pengelola Arsip di unit kearsipan;

- d. penilaian oleh panitia penilai arsip;
- e. permintaan persetujuan dari pimpinan Pencipta Arsip;
- f. penetapan arsip yang akan dimusnahkan; dan
- g. pelaksanaan pemusnahan.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan prosedur pemusnahan arsip.
- (2) Ketentuan mengenai teknik pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENYERAHAN ARSIP STATIS

#### Pasal 10

Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah dilakukan terhadap arsip yang:

- a. memiliki nilai guna kesejarahan;
- b. telah habis retensinya; dan/atau
- c. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA Pencipta Arsip.

#### Pasal 11

Prosedur penyerahan Arsip Statis dilaksanakan sebagai berikut:

- a. penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh Arsiparis/Pengelola Arsip di unit kearsipan;
- b. penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah;
- c. pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan Daerah sesuai wilayah kewenangannya disertai dengan pernyataan dari pimpinan Pencipta Arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan; dan
- d. verifikasi dan persetujuan dari kepala Lembaga Kearsipan Daerah sesuai wilayah kewenangannya.
- e. penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan Pencipta Arsip; dan
- f. pelaksanaan serah terima Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada kepala Lembaga Kearsipan Daerah dengan disertai berita acara dan daftar arsip yang akan diserahkan.

## Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan sesuai dengan prosedur penyerahan Arsip Statis.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 27 Desember 2019  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR 52

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR       TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP

PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP

SISTEMATIKA

BAB I       PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF

- A. Penyeleksian Arsip Inaktif;
- B. Penataan Arsip Inaktif; dan
- C. Pembuatan Daftar Arsip Inaktif.

BAB II       PEMUSNAHAN ARSIP

- A. Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- B. Penyeleksian Arsip;
- C. Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah;
- D. Penilaian Arsip;
- E. Permintaan Persetujuan;
- F. Penetapan Arsip yang Akan Dimusnahkan; dan
- G. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip:

BAB III       PENYERAHAN ARSIP STATIS

- A. Penyeleksian dan Pembuatan Daftar Arsip Usul Serah;
- B. Penilaian;
- C. Pemberitahuan Penyerahkan Arsip Statis;
- D. Verifikasi dan Persetujuan.
- E. Penetapan Arsip yang Akan Diserahkan; dan
- F. Pelaksanaan Serah Terima Arsip Statis.



## BAB I PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF

Kegiatan pemindahan Arsip Inaktif meliputi kegiatan:

- A. Penyeleksian Arsip Inaktif;
- B. Penataan Arsip Inaktif; dan
- C. Pembuatan daftar Arsip Inaktif.

### A. PENYELEKSIAN ARSIP INAKTIF

1. Penyeleksian Arsip Inaktif dilakukan melalui JRA dengan cara melihat pada kolom retensi aktif.
2. Dalam hal retensi aktifnya telah habis atau terlampaui, maka arsip tersebut telah memasuki masa inaktif atau frekuensi penggunaan arsip yang telah menurun (ditandai dengan penggunaan kurang dari 5 (lima) kali dalam setahun).

### B. PENATAAN ARSIP INAKTIF

1. Penataan Arsip Inaktif dilakukan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli:
  - a. asas “asal usul” adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan Pencipta Arsip (*provenance*), tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari Pencipta Arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya.
  - b. asas “aturan asli” adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya (*original order*) atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pencipta Arsip.
2. Penataan Arsip Inaktif pada Unit Pengolah/Unit Kerja dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pengaturan fisik arsip;
  - b. pengolahan informasi arsip; dan
  - c. penyusunan daftar Arsip Inaktif.
3. Penataan Arsip Inaktif yang dipindahkan ke dalam boks, dengan rincian kegiatan:
  - a. menata folder/berkas yang berisi Arsip Inaktif yang akan dipindahkan yang diurutkan berdasarkan nomor urut daftar Arsip Inaktif yang dipindahk menyimpan dan memasukkan folder/berkas Arsip Inaktif ke dalam boks arsip;
  - b. memberi label boks arsip, dengan keterangan: nomor boks, nama Unit Pengolah, nomor urut arsip, dan tahun penciptaan arsip.
4. Penataan Arsip Inaktif dan pembuatan daftar Arsip Inaktif menjadi tanggung jawab Kepala Unit Pengolah/Unit Kerja.

C. PEMBUATAN DAFTAR ARSIP INAKTIF

1. Pencipta Arsip menyusun daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan dan ditandatangani oleh pimpinan Unit Pengolah/Unit Kerja selaku yang memindahkan arsip dan Unit Kearsipan di lingkungan Pencipta Arsip selaku penerima arsip atau pejabat yang diberi kewenangan. Daftar Arsip Inaktif sekurang-kurangnya memuat:
- a. Pencipta Arsip;
  - b. Unit Pengolah;
  - c. nomor arsip;
  - d. kode klasifikasi;
  - e. uraian informasi arsip;
  - f. kurun waktu;
  - g. jumlah; dan
  - h. keterangan.

Contoh:

DAFTAR ARSIP INAKTIF YANG DIPINDAHKAN

SKPD/UNIT KERJA : .....  
KABUPATEN : TANAH BUMBU

NO	KODE KLASIFIKASI ARSIP	JENIS/SERIES ARSIP	TAHUN	JUMLAH	TINGKAT PERKEMBANGAN	NOMOR BOKS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Yang memindahkan  
  
(Unit Kerja)  
  
Nama Jabatan  
  
ttd  
  
nama terang  
NIP

Yang menerima  
  
(Unit Kearsipan)  
  
Nama Jabatan  
  
ttd  
  
nama terang  
NIP

Petunjuk Pengisian :

- (1) Nomor : Berisi nomor urut jenis arsip
- (2) Kode Klasifikasi : Berisi tanda pengenal arsip yang dapat membedakan Arsip antara masalah yang satu dengan masalah yang lain
- (3) Jenis/Series Arsip : Berisi jenis/series arsip
- (4) Tahun : Berisi tahun terciptanya arsip
- (5) Jumlah : Berisi jumlah arsip dalam setiap jenis arsip (eksemplar/folder/ boks).
- (6) Tingkat Perkembangan : Berisi tingkat perkembangan arsip (asli/copy/tembusan). Bila terdiri dari beberapa tingkat perkembangan dicantumkan seluruhnya
- (7) Nomor Boks : Berisi nomor yang memuat lokasi pada boks berapa jenis arsip disimpan
- (8) Keterangan : Berisi kekhususan arsip (kertas rapuh/berkas tidak lengkap/lampiran tidak ada)

2. Berita Acara Pemindahan Arsip sekurang-kurangnya memuat waktu pelaksanaan, tempat, jenis arsip yang dipindahkan, jumlah arsip, pelaksana dan penandatanganan oleh pimpinan Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan.

Contoh:

BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP

Nomor :.....

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan berdasarkan penilaian kembali arsip telah melaksanakan pemindahan arsip..... sebanyak..... tercantum dalam Daftar Arsip yang Dipindahkan sebagaimana terlampir.

Berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan PARA PIHAK menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.

Dibuat di .....(tempat), ..... (tanggal)

PIHAK YANG MEMINDAHKAN

Jabatan\*)

ttd

Nama tanpa gelar\*\*)

NIP

PIHAK YANG MENERIMA

Jabatan\*)

ttd

Nama tanpa gelar\*\*)

NIP

11. Dalam hal pemindahan arsip yang memiliki nilai guna berkelanjutan ke Unit Depot penyimpanan Arsip Inaktif yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah atau Pemindahan Arsip Inaktif di lingkungan Pencipta Arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, pendokumentasian proses pemindahan dilakukan dengan membuat Berita Acara Pemindahan Arsip.

## BAB II PEMUSNAHAN ARSIP

Prosedur pemusnahan arsip oleh Pencipta Arsip melalui tahapan sebagai berikut:

- A. Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- B. Penyeleksian Arsip;
- C. Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah;
- D. Penilaian Arsip;
- E. Permintaan Persetujuan Pemusnahan;
- F. Penetapan Arsip yang Akan Dimusnahkan; dan
- G. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip.

### A. PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

1. Pembentukan panitia penilai arsip ditetapkan oleh pimpinan Pencipta Arsip.
2. Panitia penilai arsip bertugas untuk melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan.
3. Panitia penilai arsip berjumlah ganjil.
4. Panitia penilai arsip sekurang-kurangnya memenuhi unsur :
  - a. pimpinan Unit Kearsipan sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
  - c. Arsiparis/Pengelola Arsip sebagai anggota.
5. Panitia penilai arsip pemerintah daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun terdiri dari:
  - a. pimpinan Unit Kearsipan pada tiap perangkat daerah sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
  - c. Arsiparis sebagai anggota.
6. Panitia penilai arsip pemerintah daerah yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terdiri dari:
  - a. pimpinan Lembaga Kearsipan Daerah sebagai ketua merangkap anggota;

- b. pimpinan perangkat daerah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
  - c. Arsiparis sebagai anggota.
7. Dalam hal Pencipta Arsip belum memiliki Arsiparis, anggota dapat digantikan oleh pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip.

B. PENYELEKSIAN ARSIP

1. Penyeleksian arsip dilakukan oleh panitia penilai arsip melalui JRA dengan cara melihat pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah.
2. Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah, maka arsip tersebut dapat dikategorikan sebagai arsip usul musnah.
3. Dalam hal Pencipta Arsip belum memiliki JRA, dalam melaksanakan pemusnahan arsip mengikuti tahapan prosedur pemusnahan arsip dan setelah mendapat persetujuan Kepala ANRI.

C. PEMBUATAN DAFTAR ARSIP USUL MUSNAH

1. Hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam daftar arsip usul musnah.
2. Daftar arsip usul musnah sekurang-kurangnya berisi: nomor, jenis arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, dan keterangan.

Contoh:

DAFTAR ARSIP USUL MUSNAH

NO	JENIS ARSIP	TAHUN	JUMLAH	TINGKAT PERKEMBANGAN	KETERANGAN

Keterangan :

- Nomor : berisi nomor urut
- Jenis/Series Arsip : berisi jenis/series arsip
- Tahun : berisi tahun pembuatan arsip

Jumlah : berisi jumlah arsip  
Tingkat Perkembangan : berisi tingkatan keaslian arsip (asli, copy, atau salinan)  
Keterangan : berisi informasi tentang kondisi arsip (misalnya rusak/tidak lengkap/berbahasa asing/daerah.

D. PENILAIAN ARSIP

- 1. Panitia penilai melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul musnah dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip.
- 2. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam nomor 22 dituangkan dalam pertimbangan tertulis oleh panitia penilai arsip.

Contoh:

SURAT PERTIMBANGAN

PANITIA PENILAI ARSIP

Berkenaan dengan permohonan persetujuan pemusnahan arsip di ..... (*Nama BUMD*)..... berdasarkan Surat ..... (*Pejabat Pengirim Surat*) .....Nomor:.....tanggal....., dalam hal ini telah dilakukan penilaian dari tanggal.....s/d....., terhadap daftar arsip yang diusulkan musnah dengan menghasilkan pertimbangan:

*a.menyetujui* usulan pemusnahan arsip sebagaimana terlampir; *atau b.menyetujui* usulan pemusnahan arsip, namun ada beberapa berkas yang dipertimbangkan agar *tidak dimusnahkan* dengan alasan tertentu.....  
*sebagaimana terlampir.*

Demikian hasil pertimbangan panitia penilai arsip, dengan harapan permohonan *persetujuan* usul pemusnahan arsip dapat ditindaklanjuti dengan cepat melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Nama kota, tanggal, bulan, tahun

1. ( Ketua ) .....

(...NIP...,...jabatan.....)

2. Anggota .....

(...NIP...,...jabatan.....)

3. Anggota .....

(...NIP...,...jabatan.....)

4. Anggota .....

(...NIP...,...jabatan.....)

5. Anggota .....

(...NIP...,...jabatan.....)

## E. PERMOHONAN PERSETUJUAN/PERTIMBANGAN

1. Persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip terdiri dari:
  - a. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI.
  - b. Pemusnahan arsip di lingkungan BUMD, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun harus mendapatkan pertimbangan tertulis dari Kepala ANRI;
  - c. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;
  - d. Pemusnahan arsip di lingkungan BUMD, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun harus mendapat pertimbangan tertulis dari pimpinan BUMD, pimpinan Organisasi Politik dan pimpinan Organisasi Kemasyarakatan.
2. Ketentuan mengenai permohonan persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam nomor 24 berlaku secara mutatis mutandis bagi perusahaan atau perguruan tinggi swasta yang kegiatannya dibiayai dengan anggaran negara dan/atau bantuan luar negeri.
3. Dalam hal pemusnahan arsip tanpa JRA harus mendapatkan persetujuan dari Kepala ANRI tanpa membedakan retensinya.
4. Proses permohonan persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan surat permohonan persetujuan/pertimbangan dari pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala ANRI/Bupati/Pimpinan BUMD/Pimpinan Organisasi Politik/Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan sesuai wilayah kewenangannya. Lihat juga nomor 24.
  - b. menyampaikan daftar arsip usul musnah berupa salinan cetak dan salinan elektronik; dan
  - c. menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilai arsip.

## F. PENETAPAN ARSIP YANG AKAN DIMUSNAHKAN

1. Pimpinan Pencipta Arsip mengeluarkan penetapan terhadap arsip yang akan dimusnahkan dengan mengacu pada persetujuan tertulis dari Kepala ANRI/Bupati/Rektor/Pimpinan BUMD/Pimpinan Organisasi Politik/Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan sesuai wilayah kewenangannya (Lihat juga nomor 24) dan pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip.

## G. PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP

1. Pelaksanaan pemusnahan arsip memperhatikan ketentuan:
  - a. dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip musnah dan tidak dapat dikenali;

- b. disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat dari unit kerja bidang hukum dan/atau unit kerja pengawasan dari lingkungan Pencipta Arsip yang bersangkutan; dan
  - c. disertai penandatanganan berita acara yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan.
2. Pelaksanaan pemusnahan arsip dilakukan dengan membuat Berita Acara Pemusnahan beserta Daftar Arsip Usul Musnah yang dibuat rangkap 2 (dua).
3. Berita acara tersebut ditandatangani oleh pimpinan Unit Kearsipan, pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan, dan disaksikan sekurang-kurangnya dari unit kerja bidang hukum dan unit kerja bidang pengawasan.

Contoh :

### BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP

Nomor :.....

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan berdasarkan penilaian kembali arsip telah melaksanakan pemusnahan arsip..... sebanyak..... tercantum dalam Daftar Arsip Yang Dimusnahkan terlampir..... lembar. Pemusnahan arsip secara total dengan cara.....

Saksi-Saksi

Kepala Unit Kearsipan

1. (Kepala Unit Pengolah) .....

2. (Unit Hukum) .....

3. (Unit Pengawas Internal) .....

4. Pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan cara, antara lain:
  - a. pencacahan;
  - b. penggunaan bahan kimia; atau
  - c. *pulping*.
5. Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip wajib disimpan oleh Pencipta Arsip, meliputi:
  - a. keputusan pembentukan panitia pemusnahan arsip;
  - b. notulen rapat penitia penilai pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian;
  - c. surat pertimbangan dari panitia penilai kepada pimpinan Pencipta Arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan;
  - d. surat persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun;



- e. keputusan pimpinan Pencipta Arsip tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip;
- f. berita acara pemusnahan arsip; dan daftar arsip yang dimusnahkan.

BAB III  
PENYERAHAN ARSIP STATIS

Prosedur penyerahan Arsip Statis dilaksanakan sebagai berikut:

- A. Penyeleksian dan Pembuatan Daftar Arsip Usul Serah;
- B. Penilaian;
- C. Pemberitahuan Penyerahan Arsip Statis;
- D. Verifikasi dan Persetujuan.
- E. Penetapan Arsip yang Akan Diserahkan; dan
- F. Pelaksanaan Serah Terima Arsip Statis.

A. PENYELEKSIAN DAN PEMBUATAN DAFTAR ARSIP USUL SERAH

- 1. Penyeleksian Arsip Statis dilakukan melalui JRA dengan cara melihat pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan yang dinyatakan permanen.
- 2. Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan pada kolom keterangan dinyatakan permanen, maka arsip tersebut telah memasuki masa arsip usul serah.
- 3. Hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam daftar arsip usul serah.
- 4. Daftar arsip usul serah sekurang-kurangnya berisi: nomor, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah arsip dan keterangan.

Contoh :

DAFTAR ARSIP STATIS YANG DISERAHKAN

Nama Pencipta :.....

Alamat :.....

No.	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Kurun Waktu	Jumlah Arsip	Keterangan
1	2	3	4	5	6

..... (tempat), tanggal, tahun.....

Yang mengajukan  
Pimpinan Pencipta Arsip  
  
ttd.  
  
( nama jelas )

Menyetujui,  
Kepala Lembaga Kearsipan Daerah  
  
ttd.  
  
( nama jelas )  
  
NIP.....

Petunjuk Pengisian :

- (a) Nama Pencipta : Diisi nama instansi/Pencipta Arsip;  
(b) Alamat : Diisi alamat instansi/Pencipta Arsip;
1. Nomor : Nomor urut;  
2. Kode Klasifikasi : Kode klasifikasi arsip (apabila memiliki klasifikasi arsip);  
3. Uraian Informasi Arsip : Uraian informasi yang terkandung dalam arsip;  
4. Kurun Waktu : Kurun waktu terciptanya arsip;  
5. Jumlah Arsip : Jumlah arsip (lembaran,berkas);  
6. Keterangan : Informasi khusus yang penting untuk diketahui, seperti: kertas rapuh, berkas tidak lengkap, lampiran tidak ada, tingkat keaslian dan sebagainya.

B. PENILAIAN ARSIP

1. Panitia penilai melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul serah dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip.
2. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam nomor 39 dituangkan dalam pertimbangan tertulis oleh panitia penilai arsip.

C. PEMBERITAHUAN PENYERAHAN ARSIP STATIS

1. Pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya disertai dengan pernyataan dari pimpinan Pencipta Arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan.
2. Proses pemberitahuan penyerahan Arsip Statis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menyampaikan surat permohonan penyerahan Arsip Statis dari pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya.
- b. menyampaikan daftar arsip usul serah; dan
- c. menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilai arsip.

#### D. VERIFIKASI DAN PERSETUJUAN

1. Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya melakukan verifikasi daftar arsip usul serah berdasarkan permohonan penyerahan Arsip Statis dari Pencipta Arsip.
2. Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya dapat memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi daftar arsip usul serah terhadap arsip yang diterima atau ditolak kepada Pencipta Arsip.
3. Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya memberikan persetujuan atas daftar arsip usul serah dari Pencipta Arsip.

#### E. PENETAPAN ARSIP YANG DISERAHKAN

Pimpinan Pencipta Arsip mengeluarkan penetapan terhadap arsip yang akan diserahkan kepada Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya dengan mengacu pada persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan.

#### F. PELAKSANAAN SERAH TERIMA ARSIP

1. Pelaksanaan serah terima Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan dengan disertai berita acara, daftar arsip usul serah dan fisik arsip yang akan diserahkan.
2. Susunan format berita acara meliputi:
  - a. Kepala, memuat logo, judul, dan hari/ tanggal/ tahun, tempat pelaksanaan penandatanganan, nama dan jabatan para pihak yang membuat berita acara;
  - b. batang tubuh, memuat kegiatan yang dilaksanakan, termasuk bilamana ada klausul perjanjian antara kedua pihak khususnya mengenai hak akses Arsip Statis;
  - c. kaki, memuat nama jabatan dan pejabat atau pihak yang dikuasakan olehnya, serta tanda tangan para pihak yang melakukan penandatanganan naskah berita.

Contoh:



NAMA PENCIPTA ARSIP YANG MENYERAHKAN ARSIP STATIS

ALAMAT PENCIPTA ARSIP  
TELEPON, FAKSIMILI, WEBSITE

BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP

DARI (NAMA PENCIPTA ARSIP) KEPADA LEMBAGA KEARSIPAN ...  
NOMOR : KODE KLASIFIKASI/ TAHUN PENYERAHAN

Pada hari ini , ..... , tanggal ....., bulan ....., tahun ..... bertempat di .... (nama tempat dan alamat), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :  
NIP/NIK :  
Jabatan\*) :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA bertindak untuk dan atas nama (PENCIPTA ARSIP yang menyerahkan).

- 2. Nama :  
NIP/NIK :  
Jabatan\*) :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, telah melaksanakan serah terima arsip ..... (nama PENCIPTA ARSIP yang menyerahkan) yang memiliki nilai guna nasional seperti yang tercantum dalam daftar arsip terlampir untuk disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah.

Berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan PARA PIHAK menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.

Dibuat di .....(tempat), ..... (tanggal)

PIHAK KEDUA  
Jabatan\*)  
ttd

Nama tanpa gelar\*\*)  
NIP

PIHAK PERTAMA  
Jabatan\*)  
ttd

Nama tanpa gelar\*\*)  
NIP

\*) Pimpinan instansi/Pencipta Arsip dapat diwakilkan.  
\*\*) Huruf dicetak **bold**.  
Naskah Berita Acara diketik menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style*, ukuran 12 \*)  
Dalam hal tertentu dapat diwakilkan

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR















LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR  
TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
I	URUSAN PERTANIAN				
1	KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan, Pemasaran Hasil Pertanian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
2	PEMBINAAN a Data pengadaan, penyaluran, penggunaan dan peredaran (benih, pupuk, pestisida dan alat mesin) b Penyiapan fasilitas pengembangan (lahan, pemanfaatan sumber - sumber air, produksi pertanian) c Pemeliharaan lahan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
3	PENGEMBANGAN LAHAN DAN PRODUKSI a. Data potensi sumber daya lahan dan air b. Data perkembangan pengembangan lahan dan produksi pertanian  c. Sumber daya lahan dan tata guna air d. Konservasi dan rehabilitasi lahan e. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi f. Data kawasan dan sentra - sentra produksi pertanian g. Luas panen, Produksi dan Produktivitas tanaman pangan dan hortilkultura  h. Laporan hasil kegiatan pengembangan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas  Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV  Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian  Dinas Pertanian  Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
4	<p>PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN</p> <p>1) Bina usaha pertanian</p> <p>a. Pengembangan usaha pertanian</p> <p>b. Data pengembangan usaha</p> <p>c. Bahan dan sarana</p> <p>d. Promosi dan pengembangan usaha</p> <p>e. Laporan pengembangan usaha</p> <p>2) Kemitraan dan kewirausahaan pertanian</p> <p>a. Data kemitraan dan kewirausahaan</p> <p>b. Laporan kemitraan dan kewirausahaan</p> <p>3) Mutu, distribusi dan pemasaran hasil pertanian</p> <p>a. Data kinerja benih/bibit dan mutu hasil pertanian</p> <p>b. Akreditasi mutu benih/bibit</p> <p>c. Bahan pembinaan uji mutu</p> <p>d. Sertifikat benih/bibit, mutu hasil pertanian</p> <p>e. Data penawaran dan permintaan hasil pertanian</p> <p>f. Laporan mutu distribusi dan pemasaran</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
5	<p>PEMBENIHAN DAN PENGEMBANGAN</p> <p>1) Data pengadaan, penyaluran, penggunaan dan peredaran benih dan teknologi</p> <p>2) Sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura</p> <p>3) Pengembangan teknologi pertanian (produksi, sarana dan prasarana, pengolahan hasil pertanian, alat dan mesin, perbenihan)</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
6	<p>PROGRAM BIMAS/LINMAS</p> <p>(Program intensifikasi dan ekstensifikasi) Serangan penyakit dan hama tanaman</p> <p>1) Pencegahan</p> <p>2) Pemberantasan</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
7	BIMBINGAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PENGUSAHA DAN PETANI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
8	TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
	A Pembinaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	1) Data pengadaan, penyaluran, penggunaan dan peredaran (benih, pupuk, pestisida, alat mesin)				
	2) Penyiapan fasilitas pengembangan (lahan, pemanfaatan sumber - sumber air, produksi pertanian)				
	3) Pemeliharaan lahan				
	B Pengembangan Lahan dan Produksi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	1) Data potensi sumber daya lahan dan air				
	2) Data perkembangan pengembangan lahan dan produksi pertanian				
	3) Sumber daya lahan dan tata guna air				
	4) Konversasi dan rehabilitasi lahan				
	5) Sistem kewaspadaan pangan dan gizi				
	6) Data kawasan dan sentra-sentra produksi pertanian				
	7) Luas panen, produksi dan produktivitas tanaman dan hortikultura				
	8) Laporan hasil kegiatan pengembangan				
	C Pemasaran dan Pengembangan Usaha Pertanian				
	1) Bina usaha pertanian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	(a) Pengembangan usaha pertanian	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	(b) Data pengembangan usaha	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	(c) Bahan dan sarana	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	(d) Promosi dan pengembangan usaha	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	(e) Dokumen penyaluran kredit pengembangan usaha tani	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	(f) Dokumen bantuan pengembangan usaha	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	(g) Laporan pengembangan usaha	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.	Dinas Pertanian
	2) Kemitraan dan kewirausahaan pertanian	Biasa/Terbuka	Eselon IV		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(a) Data kemitraan dan kewirausahaan (b) Laporan kemitraan dan kewirausahaan			Tanah Bumbu	
	3) Mutu, distribusi dan pemasaran hasil pertanian (a) Data kinerja benih/bibit dan mutu hasil pertanian (b) Akreditas mutu benih/bibit (c) Bahan pembinaan uji mutu (d) Sertifikat benih/bibit, mutu hasil pertanian (e) Data penawaran dan permintaan hasil pertanian (f) Dokumen sisi mutu (Doksistu) otorius kompeten keamanan pangan daerah (OKKPD) (g) Hasil uji laboratorium tentang keamanan pangan produksi segar  (h) Hasil uji mutu produsen pangan (i) Laporan mutu distribusi dan pemasaran  D Pembenihan dan pengembangan teknologi 1) Data pengadaan, penyaluran, penggunaan dan peredaran benih dan teknologi 2) Sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura 3) Pengembangan teknologi pertanian (produksi, sarana dan prasarana, pengolahan hasil pertanian, alat dan mesin, perbenihan)  E Program Bimas/Linmas (program intensifikasi dan ekstensifikasi) Serangan penyakit dan hama tanaman 1) Pencegahan 2) Pemberantasan  F Bimbingan dan penyuluhan terhadap pengusaha dan petani	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas Terbatas  Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka   Biasa/Terbuka   Biasa/Terbuka   Biasa/Terbuka   Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon III Eselon III  Eselon IV Eselon IV  Eselon IV   Eselon IV   Eselon IV   Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian  Dinas Pertanian  Dinas Pertanian  Dinas Pertanian  Dinas Pertanian  Dinas Pertanian
10	PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (1) Perluasan dan Pengelolaan Lahan (a) Basis Data Lahan - Identifikasi Lahan - Analisis dan Penyajian Data Lahan (b) Pengendalian Lahan - Identifikasi dan Analisis Lahan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	- Rekomendasi Teknis pengendalian lahan (c) Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.</li> <li>- Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.</li> </ul> (d) Perluasan Kawasan Tanaman Pangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan.</li> <li>- Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan.</li> </ul> (e) Perluasan Kawasan Hortikultura <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura</li> <li>- Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura.</li> </ul>				
	(2) Pengelolaan Air Irigasi (a) Pengembangan Sumber Air <ul style="list-style-type: none"> <li>- Air Permukaan</li> <li>- Air Tanah</li> </ul> (b) Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Jaringan</li> <li>- Optimasi Air</li> </ul> (c) Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iklim</li> <li>- Konservasi Air dan Lingkungan Hidup</li> </ul> (d) Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi Kelembagaan</li> <li>- Pengembangan Kelembagaan</li> </ul>	Biasa/Terbuka		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	(3) Pembiayaan Pertanian (a) Pembiayaan Program <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dan Informasi pembiayaan program</li> <li>- Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program</li> </ul> (b) Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan Syariah</li> <li>- Kerja Sama pembiayaan</li> </ul>	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(c) Pembiayaan Agribisnis				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis</li> <li>- Fasilitasi dan Pemantauan pembiayaan agribisnis</li> </ul>				
	(d) Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan Agribisnis</li> <li>- Pemberdayaan Agribisnis</li> </ul>				
	(4) Pupuk Pestisida	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	(a) Pupuk Organik dan Pembenah Tanah				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan</li> <li>- Hortikultura</li> </ul>				
	(b) Pupuk Anorganik				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan</li> <li>- Hortikultura</li> </ul>				
	(c) Pestisida				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pestisida Kimia</li> <li>- Pestisida Hayati</li> </ul>				
	(d) Pengawasan Pupuk dan Pestisida				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Pupuk</li> <li>- Pengawasan Pestisida</li> </ul>				
	(5) Alat dan Mesin Pertanian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	(a) Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> </ul>				
	(b) Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> </ul>				
	(c) Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan</li> <li>- Pelayanan</li> </ul>				
11	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN				
	(1) Pengolahan Hasil Pertanian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	(a) Tanaman Pangan				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sereal</li> <li>- Aneka Kacang dan Aneka Umbi</li> </ul>				
	(b) Hortikultura				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Buah dan Sayuran</li> <li>- Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat</li> </ul>				



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(2) Mutu dan Standariasi (a) Standardisasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Perkebunan dan Peternakan</li> </ul> (b) Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Perkebunan dan Peternakan</li> </ul> (c) Akreditasi dan Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Perkebunan dan Peternakan</li> </ul> (d) Kerjasama dan Harmonisasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Perkebunan dan Peternakan</li> </ul>	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	(3) Pengembangan Usaha dan Investasi (a) Kemitraan dan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemitraan</li> <li>- Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif</li> </ul> (b) Investasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Perkebunan dan Peternakan</li> </ul> (c) Promosi Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daya Saing</li> <li>- Eksibisi dan Ekspo</li> </ul> (d) Promosi Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daya Saing</li> <li>- Eksibisi dan Ekspo</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	(4) Pemasaran Domestik (a) Informasi Pasar <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Pasar</li> <li>- Deseminasi Informasi Pasar</li> </ul> (b) Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan Pasar</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian

[illegible]



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahunan 4) Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran a. Dampak Perubahan Iklim b. Pencegahan Kebakaran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemprov. Kalsel	Dinas Pertanian
13	E Pembinaan Usaha 1) Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan a. Bimbingan Usaha Perkebunan b. Perkebunan Berkelanjutan 2) Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik a. Gangguan Usaha Perkebunan b. Penanganan Konflik  3) Proses Penyelesaian Pengusutan Benih Ilegal  4) Proses Penyelesaian Pengusutan Peredaran Pupuk dan Peredaran Pestisida  5) Proses Penyelesaian Sengketa Perusahaan Perkebunan Besar Negara/Swasta  PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN A Perbibitan Ternak 1) Produksi Bibit Ternak Ruminansia a. Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar b. Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil 2) Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia a. Produksi Bibit Ternak Unggas b. Produksi Bibit Aneka Ternak 3) Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak	Biasa/Terbuka  Terbatas  Terbatas  Terbatas  Terbatas  Biasa/Terbuka	Eselon IV  Eselon III  Eselon III  Eselon III  Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian  Dinas Pertanian  Dinas Pertanian  Dinas Pertanian  Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	a. Penilaian Bibit Ternak b. Pelepasan Bibit Ternak 4) Mutu Bibit ternak a. Sertifikasi Bibit Ternak b. Pengawasan Mutu Bibit Ternak 5) Pengembangan Bibit Ternak a. Analisis Pengembangan Bibit Ternak b. Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak				
	6) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran B Pakan Ternak 1) Bahan Pakan a. Bahan Pakan Asal Hewan b. Bahan Pakan Asal Tumbuhan 2) Pakan Hijauan a. Budidaya Pakan Hijauan b. Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak 3) Pakan Olahan a. Produksi Pakan Olahan b. Pengolahan Pangan 4) Mutu Pakan a. Sertifikasi Pakan b. Pengawasan Pakan 5) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	C Budidaya Ternak 1) Ternak Potong a. Ternak Sapi dan Kerbau Potong b. Ternak Kambing dan Domba Potong 2) Ternak Perah a. Ternak Sapi dan Kerbau Perah b. Ternak Kambing Perah 3) Ternak Unggas dan Aneka Ternak a. Ternak Unggas b. Aneka Ternak dan Monogastrik 4) Usaha dan Kelembagaan a. Pemberdayaan masyarakat/lembaga (LM3)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	b. Sarjana Membangun Desa (SMD)  D Kesehatan Hewan 1) Pengamatan Penyakit Hewan a. Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner b. Penyidikan Penyakit Hewan 2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan a. Pencegahan Penyakit Hewan b. Pemberantasan Penyakit Hewan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	c. Rekomendasi MBM 3) Perlindungan Hewan a. Analisis Risiko Penyakit Eksotik b. Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan 4) Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan a. Kelembagaan Kesehatan Hewan b. Sumber Daya Kesehatan Hewan c. Laporan THL d. Proposal Poskeswan 5) Pengawasan Obat Hewan a. Mutu Obat Hewan b. Peredaran Obat Hewan c. Pendaftaran Obat Hewan d. Rekomendasi Obat Hewan				
	E Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen 1) Pascapanen a. Teknologi Pascapanen b. Sarana Pascapanen 2) Higien Sanitasi a. Penerapan Higiene Sanitasi b. Inspeksi Higiene Sanitasi 3) Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan a. Pengawasan Sanitary b. Pengawasan Keamanan Produk Hewan 4) Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan a. Zoonosis b. Kesejahteraan Hewan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
14	5) Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan a. Pengujian Produk Hewan; b. Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan 6) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran  KETAHANAN PANGAN A Harga dan Cadangan Pangan 1) Data harga pangan pokok Kabupaten/Kota 2) Data pasokan di pasar dan eceran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	3) Stok cadangan pangan B Distribusi Pangan 1) Pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) 2) Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (P-LDPM) 3) Akses pangan C Pengawasan Keamanan Pangan 1) Pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) (a) Uji laboratorium (b) Uji rapat tes kit 2) Laporan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	D Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan 1) Sistem jaminan mutu OKKPD (a) Pelaku usaha (b) Uji laboratorium (c) Produsen pangan 2) Informasi keamanan pangan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	E Kerawanan Pangan 1) FSVA 2) SKPG 3) Database desa mandiri pangan 4) Database kawasan mandiri pangan 5) Daerah rawan pangan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
15	F Ketersediaan Pangan 1) Lumbung pangan 2) Analisis ketersediaan pangan (a) HBKN (b) PPH Ketersediaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	G Promosi dan Penganekaragaman Pangan 1) Promosi penganekaragaman pangan (a) Pameran 2) Diversifikasi pangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	H Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal 1) Pengembangan pangan lokal (a) KRPL (b) Usaha kecil menengah (UKM) 2) Pengelolaan konsumsi pangan masyarakat (a) Lomba cipta menu (LCM) (b) Beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) (c) Pola pangan harapan (PPH) 3) Pokjanal Posyandu	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	KESEHATAN HEWAN				
	A Perbibitan Ternak 1) Produksi bibit ternak Ruminansia (a) Produksi bibit ternak Ruminansia besar (b) Produksi bibit ternak Ruminansia kecil	Terbuka	Eselon II & III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	2) Produksi bibit ternak Non Ruminansia (a) Produksi bibit ternak unggas (b) Produksi bibit aneka ternak	Terbuka	Eselon II & III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	3) Penilaian dan pelapasan bibit ternak (a) Penilaian bibit ternak (b) Penilaian bibit aneka ternak	Terbatas	Eselon II & III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	4) Mutu bibit ternak	Terbatas	Eselon	Memiliki dampak yang mengganggu	Dinas Pertanian



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(a) Sertifikasi bibit ternak (b) Pelepasan bibit ternak  5) Pengembangan bibit ternak (a) Analisis pengembangan bibit ternak (b) Kelembagaan pengembangan bibit ternak 6) Surat rekomendasi & persetujuan pemasukan/pengeluaran	   Terbuka   Terbatas	   II & III   Eselon II & III   Eselon II & III	   Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu   Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	   Dinas Pertanian   Dinas Pertanian
	B Pakan Ternak 1) Bahan pakan (a) Bahan pakan asal hewan (b) Bahan pakan asal tumbuhan  2) Pakan hijauan (a) Budidaya pakan hijauan (b) Kawasan penggembalaan dan integrasi ternak  3) Pakan Olahan (a) Produksi pakan olahan (b) Pengolahan pangan  4) Mutu pakan (a) Sertifikasi pakan (b) Pengawasan pakan  5) Surat rekomendasi & persetujuan pemasukan/pengeluaran  C Budidaya Ternak 1) Ternak potong (a) Ternak sapi dan kerbau potong (b) Ternak kambing dan domba potong	   Terbatas   Terbatas   Terbatas   Terbatas   Terbatas   Terbatas	   Eselon III   Eselon III   Eselon III   Eselon III   Eselon III	   Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu   Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu   Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu   Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu   Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	   Dinas Pertanian   Dinas Pertanian   Dinas Pertanian   Dinas Pertanian   Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	2) Ternak perah (a) Ternak sapi dan kerbau perah (b) Ternak kambing perah  3) Ternak unggas dan aneka ternak (a) Ternak unggas (b) Aneka ternak dan monogastrik  4) Usaha dan kelembagaan (a) Pemberdayaan masyarakat/lembaga (LM3) (b) Sarjana membangun desa (c) Dokumen penyaluran kredit pengembangan usaha tani (d) Dokumen bantuan pengembangan usaha	Terbatas   Terbuka   Terbatas	Eselon III   Eselon IV   Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian   Dinas Pertanian   Dinas Pertanian
	D Kesehatan Hewan 1) Pengamatan penyakit hewan (a) Epidemiologi dan ekonomi veteriner (b) Penyidikan penyakit hewan  2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (a) Pencegahan penyakit hewan (b) Pemberantasan penyakit hewan (c) Rekomendasi MBM 3) Perlindungan Hewan (a) Analisis risiko penyakit eksotik (b) Kesiagaan darurat penyakit hewan  4) Kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan (a) kelembagaan kesehatan hewan (b) Sumber daya kesehatan hewan (c) Laporan THL (d) Proposal Poskeswan 5) Pengawasan obat hewan (a) Mutu obat hewan (b) Peredaran obat hewan (c) Pendaftaran obat hewan	Terbatas   Terbatas   Terbatas   Terbatas   Terbatas	Eselon III   Eselon III   Eselon III   Eselon III   Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian   Dinas Pertanian   Dinas Pertanian   Dinas Pertanian   Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(d) Rekomendasi obat hewan  E Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen 1) Pascapanen (a) Teknologi pascapanen (b) Sarana pascapanen 2) Higien Sanitasi (a) Penerapan higiene sanitasi (b) Inspeksi higien sanitasi  3) Pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan (a) Pengawasan sanitary (b) Pengawasan keamanan produk hewan	Terbuka           Terbatas           Terbatas	Eselon IV           Eselon III           Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu           Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu           Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian           Dinas Pertanian           Dinas Pertanian
	4) Zoonosis dan kesejahteraan hewan (a) Zoonosis (b) Kesejahteraan hewan  5) Pengujian dan sertifikasi produk hewan (a) Pengujian produk hewan (b) Registrasi dan sertifikasi produk hewan  6) Surat rekomendasi dan persetujuan pemasukan/pengeluaran	Terbatas           Terbatas           Terbatas	Eselon III           Eselon III           Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu           Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu           Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan           Dinas Perdagangan           Dinas Perdagangan
<b>II</b>	<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>				
1	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
2	PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
3	PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	Dinas Perdagangan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
4	PELELANGAN BARANG KOMODITAS	Biasa/Terbuka	Eselon IV	mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
5	PROMOSI / PEMASARAN (A) Pameran Perdagangan (B) Iklan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
6	EKSPOR DAN IMPORT	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
7	PENGAWASAN DISTRIBUSI/PENYALURAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
8	PERDAGANGAN ANTAR PULAU	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
9	SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) BARANG	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
10	PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPOR (API)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
11	DOKUMEN LAINNYA DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
12	PERLINDUNGAN KONSUMEN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
13	PENGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PERGUDANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	Dinas Perdagangan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
14	ANEKA USAHA PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
15	BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
16	STANDARISASI HARGA	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
III	URUSAN PERHUBUNGAN				
1	KEBIJAKAN MENGENAI PERHUBUNGAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISHUB
2	LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA  A. Jaringan prasarana dan pelayanan: 1) Penentuan dan penetapan lokasi terminal 2) Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal 3) Pemanfaatan terminal 4) Jaringan trayek angkutan, jaringan lintas jalan primer, dan jaringan 5) Penetapan kelas jalan primer 6) Kualifikasi teknis petugas terminal  B. Pengembangan transportasi jalan 1) Peta jalan raya 2) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan 3) Pengembangan transportasi jalan  C. Sarana angkutan jalan 1) Pengujian kendaraan bermotor 2) Teknologi kendaraan bermotor (pengujian, persyaratan teknis dan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISHUB

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
3	D. Lalu lintas jalan 1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas 2) Perlengkapan jalan  E. Angkutan jalan 1) Angkutan penumpang 2) Angkutan barang  F. Pengendalian operasional 1) Monitoring operasional 2) Teknis penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan  LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN A. Jaringan transportasi (analisa, evaluasi, trayek dan pengembangan)  B. Sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan  C. Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISHUB
4	D. Peta aliran sungai, peta wilayah danau, tata cara, dan pengawasan lalu  PERKERETAAPIAN A. Peta pintu lintasan kereta api  B. Pemanfaatn stasiun  C. Penggunaan signal	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISHUB
5	PERHUBUNGAN LAUT A. Keamanan lalu lintas (penjagaan, rambu-rambu dan mercusuar)  B. Kegiatan pelayaran (dalam dan luar negeri)  C. Data kapal dan trayek perkapalan  D. Penggunaan pelabuhan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISHUB

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
6	<p>E. Kegiatan pengerukan laut yang mendangkal</p> <p>F. Kegiatan penjagaan pantai</p> <p>PERHUBUNGAN UDARA</p> <p>A. Kegiatan keamanan lalu lintas udara</p> <p>B. Pemanfaatan pelabuhan udara</p> <p>C. Sarana angkutan udara dan trayek penerbangan, terminal, jalan,</p> <p>D. Pelaksanaan program meliputi: pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon III</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>DISHUB</p> <p>DISHUB</p> <p>DISHUB</p> <p>DISHUB</p>
7	PENYULUHAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISHUB
8	Meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan jadwal waktu, pembiayaan dan laporan BANTUAN DANA, PENANAMAN MODAL	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISHUB
9	STANDARISASI PERHUBUNGAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISHUB
10	Meliputi : Sarana dan prasarana, data dan statistik				
10	PEMASARAN HASIL PRODUKSI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.	DISHUB
11	Meliputi: Promosi perhubungan, perlindungan, perhubungan, penentuan				
11	PERIZINAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.	DISHUB
	Meliputi : Izin mengemudi, izin trayek, izin jalan, izin laut, izin udara dan				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
12	KEAMANAN DAN KETERTIBAN Meliputi : Ketertiban lalu lintas, pencegahan dan penyelesaian pelanggaran,	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	DISHUB
13	LAPORAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.	DISHUB
<b>IV</b>	<b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
1	KEBIJAKAN Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Biasa/Tertulis	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
2	PENGOLAHAN RUANG LAUT				
	A Konservasi Ekosistem Laut				
	1) Data ekosistem laut dan pesisir yang dilindungi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
	2) Peta/zona konservasi ekosistem laut, pesisir dan keanekaragaman hayati	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	3) Peta kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan laut	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
	4) Kemitraan dengan masyarakat dan atau lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan konservasi ekosistem laut, pesisir dan keanekaragaman hayati	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
	5) Konservasi ekosistem laut, pesisir dan keanekaragaman hayati	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
	B Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
	1) Pemetaan ruang laut dan pesisir				
	2) Data potensi sumberdaya laut dan pesisir				
	3) Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi pesisir dan pantai				
	4) Penataan ruang laut dan pesisir untuk pengembangan ekosistem daerah				



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
3	5) Penerbitan izin usaha pemanfaatan ruang laut dan pesisir sesuai kewenangan 6) Monitoring dan evaluasi penataan pemanfaatan ruang laut dan pesisir				
	C Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan PPK 1) Rencana Bimtek Masyarakat Pesisir dan PPK 2) Data pesisir dan PPK 3) Supervisi pemberdayaan masyarakat pesisir dan PPK 4) Monitoring dan evaluasi masyarakat pesisir dan PPK	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
	PERIKANAN TANGKAP A. Kenelayanan 1) Data kelembagaan/kelompok nelayan 2) Bimtek pengembangan SDM nelayan secara kelembagaan/kelompok  3) Lembaga/kelompok usaha kenelayanan 4) Perlindungan nelayan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
	B Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan 1) Pengelolaan pemanfaatan dan menjaga kelestarian sumberdaya penangkapan 2) Pengelolaan kawasan tangkapan yang mempunyai sumberdaya penangkapan potensial 3) Penerbitan izin usaha perikanan penangkapan ikan diatas 5 GT sd 30 GT 4) Pemantauan penggunaan alat tangkap 5) Pengendalian penangkapan 6) Monitoring dan evaluasi kelestarian sumberdaya tangkap	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
	C Sarana dan Prasarana Penangkapan 1) Petunjuk teknis pelaksanaan 2) Peningkatan dan pengembangan prasarana penangkapan 3) Rehabilitasi dan pembangunan seta pengelolaan pelabuhan perikanan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
4	<p>4) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penangkapan</p> <p>PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN</p> <p>A Perizinan Usaha dan Investasi</p> <p>1) Pengelolaan perizinan usaha</p> <p>2) Data potensi perikanan</p> <p>3) Pemeriksaan permohonan izin usaha</p> <p>4) Penerbitan izin usaha</p> <p>B Teknologi dan Informasi</p> <p>1) Petunjuk teknis teknologi dan informasi</p> <p>2) Data pelaku usaha</p> <p>3) Bimbingan teknologi dan informasi</p> <p>4) Evaluasi pengembangan teknologi dan informasi</p> <p>C Sarana dan Prasarana Budidaya Pengolahan dan Pemasaran</p> <p>1) Petunjuk teknis sarana dan prasarana budidaya pengolahan</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>Dinas Perikanan</p> <p>Dinas Perikanan</p> <p>Dinas Perikanan</p>
	<p>2) Data sarana prasarana budidaya pengolahan dan pemasaran perikanan</p> <p>3) Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya pengolahan pemasaran perikanan</p> <p>4) Memfasilitasi pembangunan</p> <p>5) Penerbitan izin usaha</p> <p>6) Pemantauan pengembangan pembangunan sarana dan prasarana budidaya</p> <p>7) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran</p>				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
5	PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN A Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Keluar dan Perikanan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan</li> <li>2) Bimtek pemantauan sumber daya kelaurn dan perikanan</li> <li>3) Jadwal pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</li> <li>4) Rencana operasi pengawasan penangkapan ikan</li> <li>5) Pemantauan kelompok masyarakat pengawasan sumber daya kelautan</li> <li>6) Monitoring dan evaluasi pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</li> </ul> B Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana penanganan pelanggaran dan penegakan hukum</li> <li>2) Data pelanggaran dan komflik masyarakat kelautan dan perikanan</li> <li>3) Bimtek pelanggaran kelautan dan perikanan</li> <li>4) Pemantauan penanganan dan pelanggaran dan penegakan hukum</li> <li>5) Monitoring dan evaluasi penanganan dan pelanggaran dan penegakan hukum</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
	C Sarana dan Prasarana pengawasan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana sarana dan prasarana pengawasan</li> <li>2) Data sarana dan prasarana pengawasan</li> <li>3) Sosialisasi dan Bimtek sarana dan prasarana pengawasan</li> <li>4) Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan</li> <li>5) Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan</li> <li>6) Fasilitas sarana dan prasarana pengawasan</li> <li>7) Pemantauan pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan</li> <li>8) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pengawasan</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
<b>V</b>	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>				
1	KEBIJAKAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
2	PERENCANAAN PENANAMAN MODAL				
	A Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	1) Agribisnis				
	a) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan				
	b) Kelautan, Perikanan dan Peternakan				
	2) Energi				
	a) Energi Terbarukan				
	b) Energi Tak Terbarukan				
	3) Daya Mineral				
	a) Mineral Logam				
	b) Mineral Non Logam				
	B Perencanaan Industri Manufaktur	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	1) Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka				
	a) Industri Logam dan Mesin				
	b) Industri Tekstil dan Aneka				
	2) Industri Kimia				
	a) Industri Kimia Dasar				
	b) Industri Barang Kimia dan Farmasi				
	3) Industri Alat Transportasi dan Telematika				
	a) Industri Alat Transportasi dan Telematika				
	b) Industri Telematika				
	C Jasa dan Kawasan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	1) Jasa Perdagangan dan Pariwisata				
	a) Jasa Perdagangan				
	b) Jasa Pariwisata				
	2) Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya				
	a) Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan				
	b) Jasa Lainnya				
	3) Kawasan Ekonomi				
	a) Kawasan Ekonomi Khusus				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	b) Kawasan Ekonomi Lainnya  D Perencanaan Infrastruktur 1) Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan a) Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian b) Infrastruktur Jalan dan Jembatan 2) Insfrastruktur Energi dan Sumber Daya Air a) Infrastruktur Energi b) Infrastruktur Sumber Daya Air 3) Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Insfrastruktur Lainnya  a) Infrastruktur Transportasi Laut b) Infrastruktur Transportasi Udara dan Insfrastruktur Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	E Rencana alokasi bersubsidi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	F Rencana Alokasi Dana Talangan untuk Kabupaten	Terbatas	Eselon III		
3	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL A Deregulasi Penanaman Modal 1) Sektor Primer a) Pertanian, Kelautan dan Perikanan b) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan 2) Sektor Sekunder a) Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika b) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	3) Sektor Tersier a) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi b) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya				
4	PROMOSI PENANAMAN MODAL A Pengembangan Promosi 1) Analisis Strategi Promosi a) Analisis Target Promosi b) Analisis Daya Saing Promosi 2) Fasilitas Promosi Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
5	B Promosi Sektoral 1) Daya Alam, Jasa dan Kawasan a) Industri Sumber Daya Alam b) Jasa dan Kawasan 2) Promosi Industri Manufaktur a) Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik b) Industri Manufaktur Lainnya 3) Infrastruktur a) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan b) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya C Fasilitasi Promosi Daerah D Pameran dan Sarana Promosi 1) Pameran a) Penyusunan Program dan Monitoring b) Penyelenggaraan dan Evaluasi 2) Media Cetak a) Materi Promosi b) Publikasi dan Distribusi 3) Media Elektronik a) Materi Promosi b) Pelayanan Informasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	KERJASAMA PENANAMAN MODAL A Kerjasama Bilateral dan Multilateral	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	B Kerjasama Regional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	C Kerjasama Dunia Usaha Internasional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	D Kerjasama BUMD 1) Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMD 2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD berjalan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
6	3) Dokumen kepengurusan BUMD yang sedang dalam proses 4) Dokumen rahasia perusahaan BUMD 5) BUMD Bidang Keuangan (Bank Kalsel dan BPR BKK) : Data nasabah  PELAYANAN PENANAMAN MODAL A Pelayanan Aplikasi 1) Aplikasi Sektor Primer dan Tersier 2) Aplikasi Sektor Sekunder  B Pelayanan Perizinan 1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa 2) Perizinan Sektor Sekunder a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam b) Industri Kimia dan Barang Kimia c) Industri Aneka	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
7	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL A Pemantauan Penanaman Modal  B Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal  C Fasilitas Penyelesaian Masalah  D Pengawasan Penanaman Modal E Pencabutan / Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
		Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat	DPMPTSP
		Terbatas	Eselon III		
VI	F Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP di Bidang Penanaman	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
1	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b> <b>KEBIJAKAN</b> Kebijakan dibidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.	DLH

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
2	<p>TATA LINGKUNGAN</p> <p>A Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>1) Invetarisasi, penerapan ekoregion dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan</p> <p>(a) Dokumentasi inventarisasi</p> <p>(b) Pedoman Inventarisasi</p> <p>(c) Penetapan Ekoregion</p> <p>(d) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Provinsi</p> <p>(e) Pedoman penyusunan RPPLH Provinsi</p> <p>(f) Rencana pengawasan waktu/kegiatan oleh PPLHD</p> <p>2) Evaluasi pemanfaatan sumber daya alam</p> <p>(a) Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam</p> <p>(b) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam</p> <p>B Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor</p> <p>1) Evaluasi penerapan</p> <p>2) Perencanaan lingkungan hidup</p> <p>C Ekonomi Lingkungan</p> <p>1) Perencanaann</p> <p>(a) Valuasi ekonomi</p> <p>(b) Internalisasi lingkungan</p> <p>2) Insentif dan pendanaan lingkungan</p> <p>D Dampak Lingkungan</p> <p>1) Bimtek dampak lingkungan</p> <p>2) Penerapan sistem kajian dampak lingkungan</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>DLH</p> <p>DLH</p> <p>DLH</p> <p>DLH</p> <p>DLH</p>
	<p>(a) Penilaian dokumen lingkungan</p> <p>(b) Pemeriksaan dokumen lingkungan</p> <p>3) Evaluasi dan tindak lanjut</p> <p>(a) Rencana detail hasil AMDAL</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Eselon III</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>DLH</p>



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
3	(b) Evaluasi (c) Tindak lanjut	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN A Pemantauan dan Pengawasan 1) Manufaktur, prasarana dan jasa (a) Industri kimia (b) Industri logam, elektronik dan mesin (c) Aneka industri (d) Prasarana dan jasa 2) Pertambangan, energi, minyak dan gas 3) Agro industri dan usaha skala kecil (a) Peternakan dan perikanan (b) Perkebunan (c) Kehutanan dan hortikultura (d) Usaha skala kecil 4) Udara sumber bergerak (a) Transportasi air dan udara (b) Transportasi darat (c) Transportasi kereta api dan kendaraan berat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	B Evaluasi dan Pengembangan 1) Manufaktur, prasarana dan jasa (a) Industri kimia (b) Industri logam, elektronik dan mesin (c) Aneka industri (d) Prasarana dan jasa 2) Pertambangan, energi, minyak dan gas 3) Agro industri dan usaha skala kecil (a) Peternakan dan perikanan (b) Perkebunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	(c) Kehutanan dan hortikultura (d) Usaha skala kecil 4) Udara sumber bergerak (a) Transportasi air dan udara (b) Transportasi darat (c) Transportasi kereta api dan kendaraan berat				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
4	PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM  A Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Sumber daya genetik</li> <li>(b) Keamanan hayati</li> </ul> </li> <li>2) Pemanfaatan               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Sumber daya genetik</li> </ul> </li> <li>3) Pengelolaan sumber daya genetik               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengembangan dan pemanfaatan</li> <li>(b) Pemantauan dan pengawasan</li> </ul> </li> <li>4) Keamanan hayati               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengembangan dan pengelolaan</li> <li>(b) Pengembangan dan pengawasan</li> </ul> </li> <li>5) Pengendalian kerusakan lahan               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Lahan budidaya</li> <li>(b) Lahan non budidaya</li> </ul> </li> </ul> B Kerusakan Ekosistem Perairan Darat <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kerusakan ekosistem               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Sungai</li> <li>(b) Kerusakan ekosistem</li> <li>(c) Pengelolaan kualitas air</li> </ul> </li> <li>2) Danau               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengendalian kerusakan ekosistem</li> <li>(b) Pengelolaan kualitas air</li> </ul> </li> <li>3) Rawa               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Rawa gambut</li> <li>(b) Rawa bukan gambut</li> </ul> </li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	C Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pencegahan</li> <li>2) Penanggulangan</li> <li>3) Pemulihan</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
5	D Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer 1) Perangkat mitigasi 2) Inventarisasi emisi gas rumah kaca (a) Laporan inventarisasi GRK nasional (b) Data bidang inventarisasi GRK 3) Pengendalian bahan perusak ozon (a) Surat rekomendasi kepada importir terdaftar dan bahan perusak ozon (b) Hibah bantuan luar negeri terkait program perlindungan lapisan ozon 4) Pengendalian kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	E Adaptasi Perubahan Iklim 1) Perangkat adaptasi perubahan iklim (a) Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim (b) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim 2) Kerentanan perubahan iklim (a) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim (b) Media kliring kerentanan perubahan iklim	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	PENGELOLAAN B3, LIMBAH DAN SAMPAH A Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 1) Registrasi dan notifikasi (a) Registrasi (b) Notifikasi 2) Pemantauan (a) Sektor industri (b) Sektor non industri 3) Evaluasi dan tindak lanjut (a) Sektor industri (b) Sektor non industri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	B Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 1) Pengumpulan dan pemanfaatan 2) Pengangkutan dan pengolahan 3) Penimbunan dan dumping	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
6	4) Notifikasi dan rekomendasi limbah lintas batas (a) Notifikasi (b) Rekomendasi limbah lintas batas  C Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3  1) Pemantauan (a) Pertambangan, energi dan minyak, gas (b) Manufaktur (c) Argoindustri (d) Prasana, jasa dan Non institusi 2) Tanggap darurat dan pemulihan kontaminasi (a) Pertambangan, energi dan minyak, gas (b) Manufaktur (c) Argoindustri (d) Prasarana, jasa dan Non Institusi  D Pengelolaan Sampah 1) Pembatasan sampah 2) Daur ulang dan pemanfaatan sampah 3) Pembentukan dewan adipura 4) Penetapan pemenang adipura	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	HUKUM LINGKUNGAN A Hukum Administrasi Lingkungan 1) Pengelolaan dan pengembangan pengaduan (a) Pengelolaan pengaduan (b) Pengembangan pengaduan 2) Penataan hukum administrasi lingkungan (a) Penerapan hukum administrasi lingkungan (b) Pengembangan hukum administrasi lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	B Penyelesaian sengketa lingkungan 1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (a) Administrasi Gugatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(b) Gugatan 2) Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan (a) Kerugian negara dan masyarakat (b) Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup  C Penegakan Hukum Pidana Lingkungan 1) Penyidikan perkara yang sedang ditangani oleh PPHSCH (a) Administrasi penyidikan (b) Pelaksanaan penyidikan 2) Koordinasi penuntunan, evaluasi dan tindak lanjut (a) Koordinasi penuntunan (b) Evaluasi dan tindak lanjut 3) Koordinasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
7	KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A Komunikasi Lingkungan 1) Pengembangan Komunikasi (a) Program komunikasi (b) Evaluasi komunikasi 2) Publikasi dan kampanye (a) Publikasi (b) Kampanye	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	B Penguatan Inisiatif Masyarakat 1) Komunitas pendidikan lingkungan (a) Pengembangan dan bimbingan (b) Evaluasi 2) Kearifan lingkungan (a) Inventarisasi (b) Revitalisasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	C Peningkatan Peran Masyarakat 1) Masyarakat perkotaan (a) Masyarakat kawasan permukiman (b) Masyarakat kawasan rentan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	2) Masyarakat Pedesaan (a) Masyarakat petani				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(b) Masyarakat nelayan				
	D Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	1) Organisasi sosial dan masyarakat				
	2) Organisasi profesi dan dunia usaha				
8	PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS				
	A Data dan Informasi Lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	1) Pengelolaan data				
	(a) Pengumpulan dan pengelolaan data				
	(b) Manajemen basis data				
	2) Pengelolaan Informasi				
	(a) Analisis data dan penyajian informasi				
	(b) Perpustakaan				
	3) Pengembangan Perangkat Lunak				
	(a) Pengembangan instrumen layanan informasi				
	(b) Pengembangan instrumen analisis data				
	4) Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Jaringan				
	(a) Pengembangan sistem jaringan				
	(b) Pemeliharaan jaringan				
	B Kelembagaan Lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	1) Kelembagaan dan tata laksana				
	(a) Pengembangan kelembagaan				
	(b) Tata laksana				
	2) Fasilitatif standar pelayanan minimal				
	(a) Fasilitasi standar pelayanan minimal daerah Provinsi				
	(b) Fasilitasi standar pelayanan minimal daerah Kabupaten/Kota				
	C Standarisasi dan Teknologi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	1) Standarisasi manajemen dan pengujian lingkungan				
	(a) Perangkat manajemen lingkungan				
	(b) Pengujian lingkungan				
	2) Standarisasi kompetensi keahlian dan lembaga penyedia jasa lingkungan				
	(a) Kompetensi keahlian lingkungan				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(b) Kompetensi lembaga penyedia jasa lingkungan 3) Teknologi ramah lingkungan (a) Pengembangan kriteria teknologi ramah lingkungan (b) Verifikasi teknologi ramah lingkungan				
	D Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan 1) Pemantauan dan kajian kualitas lingkungan (a) Pemantauan kualitas lingkungan (b) Kajian kualitas lingkungan 2) Laboratorium rujukan dan pengujian (a) Laboratorium rujukan (b) Laboratorium pengujian dan kalibrasi 3) Hasil uji laboratorium lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
VII	URUSAN PERINDUSTRIAN				
1	SARANA DAN PRASARANA Meliputi pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISDAGRI
2	PENINGKATAN PRODUKSI Meliputi bahan baku, bahan penolong, bahan penunjang dan teknologi tepat guna	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISDAGRI
3	PEMBINAAN , PENGEMBANGAN, PENYULUHAN DAN MONITORING PERINDUSTRIAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISDAGRI
4	BANTUAN a. Modal/dana rangsangan bagi kelompok industri dan kerajinan rakyat  b. Peralatan industri dan kerajinan c. Konsultan/Tenaga ahli	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISDAGRI

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
5	DAFTAR INVENTARISASI MENURUT JENIS INDUSTRI Meliputi industri berat, industri sandang, industri ringan, industri logam, industri sedang, indsutri pangan, industri obat - obat dan aneka industri lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISDAGRI
6	STANDAR MUTU HASIL PRODUKSI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISDAGRI
7	PENGAJUAN HAK MEREKA, CIPTA, PATEN, DESAIN YANG MASIH DALAM PROSES KEMENKUMHAM	Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISDAGRI
8	PEMASARAN HASIL PRODUKSI Meliputi promosi hasil, perlindungan hasil industri, penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISDAGRI
9	DATA DAN STATISTIK BIDANG PERINDUSTRIAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISDAGRI
<b>VIII</b>	<b>URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>				
1	KEBIJAKAN Kebijakan penanggulangan bencana meliputi kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
2	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN A Pengurangan Resiko Bencana 1) Pencegahan (a) Pengkajian resiko (b) Pengelolaan Resiko 2) Mitigasi (a) Mitigasi struktur (b) Mitigasi Non struktur	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	B Pemberdayaan Masyarakat 1) Peran lembaga usaha (a) Usaha padat modal (b) Usaha padat karya 2) Peran organisasi sosial masyarakat (a) Organisasi internasional (b) Organisasi sosial masyarakat internasional 3) Peran masyarakat (a) Peningkatan kesadaran masyarakat (b) Peningkatan ketahanan masyarakat C Kesiapsiagaan 1) Peringatan dini (a) Pemaduan sistem jaringan (b) Pemantauan dan peringatan (c) Peta rawan bencana 2) Perencanaan siaga (a) Kebutuhan dan potensi sumber daya (b) Penerapan rencana strategis 3) Penyiapan sumber daya (a) Penyediaan dan penyiapan sumber daya (b) Pengendalian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	C Kesiapsiagaan 1) Peringatan dini (a) Pemaduan sistem jaringan (b) Pemantauan dan peringatan (c) Peta rawan bencana 2) Perencanaan siaga (a) Kebutuhan dan potensi sumber daya (b) Penerapan rencana strategis 3) Penyiapan sumber daya (a) Penyediaan dan penyiapan sumber daya (b) Pengendalian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
3	PENANGGAPAN DARURAT A Tanggap Darurat 1) Perencanaan darurat (a) Pendataan darurat (b) Perencanaan operasi 2) Pengendalian operasi (a) Pengorganisasian pos komando (b) Sarana dan prasarana pos komando 3) Penyelamatan dan evakuasi (a) Penyelamatan (b) Evakuasi B Bantuan Darurat 1) Bantuan sandang pangan (a) Bantuan sandang	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	Bantuan Darurat 1) Bantuan sandang pangan (a) Bantuan sandang	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(b) Bantuan pangan				
	2) Bantuan kesehatan dan air bersih (a) Bantuan kesehatan (b) Bantuan air bersih 3) Bantuan hunian sementara (a) Pembangunan hunian sementara (b) Pendukung hunian sementara C Perbaikan darurat 1) Pembersihan lingkungan (a) Penyiapan peralatan (b) Angkutan 2) Perbaikan sarana vital (a) Prasarana sosial (b) Prasarana ekonomi 3) Pemantauan dan pelaporan (a) Pemantauan (b) Pelaporan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
4	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI A Penilaian Kerusakan 1) Inventarisasi kerusakan (a) Invetarisasi fisik (b) Invetarisasi sosial ekonomi 2) Estimasi pembiayaan (a) Estimasi pembiayaan pembangunan (b) Estimasi pembiayaan sosial ekonomi B Pemulihan dan Peningkatan Fisik 1) Rehabilitasi rekonstruksi fasilitas umum (a) Rehabilitasi fasilitas umum (b) Rekonstruksi fasilitas umum 2) Rehabilitasi rekonstruksi fasilitas sosial (a) Rehabiltasi fasilitas sosial (b) Rekonstruksi fasilitas sosial 3) Rehabilitasi rekonstruksi perumahan (a) Rehabilitasi rekonstruksi berat (b) Rehabilitasi rekonstruksi ringan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	C Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi 1) Pemulihan dan peningkatan sosial budaya (a) Pemulihan dan peningkatan sosial budaya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	(b) Pemulihan dan peningkatan sosial kesehatan 2) Pemulihan dan peningkatan ekonomi (a) Pemulihan ekonomi (b) Peningkatan ekonomi				
	D Penanganan Pengungsi 1) Data identitas korban bencana (a) Di pengungsian (b) Meninggal dunia	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	2) Perlindungan dan pemberdayaan pengungsi (a) Perlindungan pengungsi (b) Pemberdayaan pengungsi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	3) Kompensasi dan pengembalian hak pengungsi (a) Kompensasi (b) Pengembalian hak	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	4) Penempatan pengungsi (a) Pemulangan dan repatriasi (b) Relokasi/Pengalihan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
5	LOGISTIK DAN KEDARURATAN				
	A Logistik				
	1) Inventarisasi kebutuhan dan pengadaan (a) Analisis kebutuhan (b) Pengadaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	2) Penyimpanan dan distribusi (a) Penyimpanan (b) Distribusi				
	B Peralatan				
	1) Inventarisasi kebutuhan dan pengadaan (a) Analisis kebutuhan (b) Pengadaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	2) Penyimpanan dan pemeliharaan (a) Penyimpanan (b) Pemeliharaan				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	3) Pengerahan dan distribusi (a) Pengerahan (b) Distribusi				
<b>IX</b>	<b>URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>				
1	KEBIJAKAN Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi, Pembiayaan,	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
2	MONITORING DAN EVALUASI	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
3	KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM A Organisasi dan Badan Hukum Koperasi (1) Organisasi Koperasi dan UKM (a) Organisasi Koperasi (b) Organisasi UKM (2) Badan Hukum Koperasi (a) Penatausahaan Badan Hukum Koperasi (b) Evaluasi Badan Hukum Koperasi (3) Penelaahan Kasus Hukum (a) - Kasus Hukum Koperasi (b) - Kasus Hukum UKM B Peraturan Perundang-Undangan (1) Penyusunan dan Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi (a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Koperasi (b) Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi (2) Penyusunan dan Evaluasi Perundangan-undangan UKM (a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UKM (b) Evaluasi Perundang-Undangan UKM (3) Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM



[illegible]

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	( b ) Pangan, Kimia dan Aneka 2) Kerajinan ( a ) Logam ( b ) Non Logam 3) Pertambangan dan Migas ( a ) Pertambangan Umum ( b ) Pertambangan Migas				
	4) Jasa dan Aneka Usaha ( a ) Jasa ( b ) Aneka Usaha  E Ketenaga Listrikan dan Aneka Usaha 1) Ketenaga Listrikan dan Konstruksi ( a ) Listrik ( b ) Konstruksi 2) Aneka Usaha ( a ) Jasa Umum ( b ) Angkutan 3) Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi ( a ) Pariwisata ( b ) Pos dan Telekomunikasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
5	PEMBIAYAAN A Program Pendanaan (1) Program Pendanaan Jangka Pendek (a) Program Pendanaan Koperasi Jangka Pendek (b) Program Pendanaan UKM Jangka Pendek (2) Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang (a) Program Pendanaan Koperasi Jangka Menengah dan Panjang (b) Program Pendanaan UKM Jangka Menengah dan Panjang (3) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir (a) Program Pendanaan Usaha Mikro (b) Program Pendanaan Dana Bergulir	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	B Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam (1) Pengembangan dan Pengendalian KSP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	DISNAKERTRANSKOP dan UM

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(b) Evaluasi dan Pelaporan (2) Penyelenggaraan (a) Sumber Daya Manusia (b) Pembiayaan (3) Tata Laksana Penelitian (a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi (b) Sarana dan Prasarana D Pengembangan Perkaderan UMK (1) Penyuluhan (a) Penyelenggaraan (b) Materi Penyuluhan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	(2) Perkaderan (a) Penilaian (b) Pengembangan (3) Kerja Sama dan Jaringan (a) Lembaga Pemerintah (b) Lembaga Non Pemerintah				
X	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	KEBIJAKAN Kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Biasa.Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DKBPPPA
2	PENGARUSUTAMAAN GENDER, EKONOMI, POLITIK SOSIAL DAN HUKUM  A Data Gender B Advokasi dan Fasilitasi C Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Gender	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DKBPPPA
3	PERLINDUNGAN PEREMPUAN (KEKERASAN, MASALAH SOSIAL, TENAGA KERJA, KORBAN PERDAGANGAN) A Data Perlindungan Perempuan B Advokasi dan Fasilitasi C Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Perempuan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DKBPPPA

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
4	D Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DKBPPPA
	E Analisis dan Penyajian Informasi Gender	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DKBPPPA
	PERLINDUNGAN ANAK (HAK SIPIL, MASALAH SOSIAL, KEKERASAN TERHADAP ANAK, ANAK BERKEBUTUHAN)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DKBPPPA
	A Data Perlindungan Anak B Advokasi dan Fasilitasi C Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Anak				
5	IDENTITAS SAKSI DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DKBPPPA
6	IDENTIFIKASI ANAK BERMASALAH DENGAN HUKUM	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
7	IDENTIFIKASI SAKSI, PELAKU, PELAPOR DAN SAKSI AHLI	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DKBPPPA
8	TEMPAT PERLINDUNGAN KORBAN	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DKBPPPA
9	TUMBUH KEMBANG ANAK (PENDIDIKAN, KESEHATAN, PARTISIPASI, LINGKUNGAN DAN PENANAMAN NILAI) A Data Tumbuh Kembang Anak	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DKBPPPA

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
XI	B Advokasi dan Fasilitas C Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Tumbuh Kembang Anak				
	<b>URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>				
1	Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan dibidang 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
2	Pengembangan destinasi pariwisata A. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata				
	(1) Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
	(2) Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
	(3) Pengembangan Zona Kreatif (a) Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya (b) Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
	(4) Invetasi Pariwisata (a) Pengembangan Potensi Investasi (b) Promosi Investasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
	(5) Pengembangan Objek Vital Nasional	Terbatas	Eselon III		DISPORA
	B. Pengembangan Daya Tarik Wisata (1) Bimtek Daya Tarik Wisata (2) Fasilitas Pengembangan Daya Tarik Wisata (3) Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota Pusaka (4) Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan (5) Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
	C. Industri Pariwisata				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(1) Sarana Pariwisata (a) usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata  (b) penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa.  (c) Sertifikasi kelembagaan dan SDM industri pariwisata  (d) Pengawasan industri pariwisata	Biasa/Terbuka   Biasa/Terbuka   Terbatas   Terbatas	Eselon IV   Eselon IV   Eselon III   Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA   DISPORA   DISPORA   DISPORA
	(2) Jasa Pariwisata: (a) jasa transportasi wisata (b) jasa informasi pariwisata (c) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi (d) jasa perjalanan wisata (e) jasa konsultan pariwisata (f) jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan (g) insentif (h) konvensi (i) pameran (3) Pengembangan Produk dan Pelayanan  D. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata (1) Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat  E. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event  (1) Pengembangan Wisata Kulier dan Belanja (2) Pengembangan Rekreasi dan Hiburan (a) Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan (b) Pengembangan Wisata Olah Raga	Biasa/Terbuka           Biasa/Terbuka      Biasa/Terbuka	Eselon IV           Eselon IV      Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu           Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu      Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA           DISPORA      DISPORA



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
3	(3) Pengembangan Wisata Alam dan Budaya  PEMASARAN PARIWISATA A. Pengembangan pasar dan informasi pariwisata (1) Informasi Pasar Dalam Negeri (a) Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri (b) Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri (2) Informasi Pasar Luar Negeri (a) Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri (b) Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri (3) Hubungan Lembaga Pariwisata dan (a) Hubungan Lembaga Pariwisata (4) Perancangan Pemasaran Pariwisata (a) Perancangan Pemasaran Dalam Negeri (b) Perancangan Pemasaran Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
	B. Promosi pariwisata luar negeri (1) Wilayah ASEAN (2) Wilayah Asia (3) Wilayah Eropa  C. Promosi Pariwisata Dalam Negeri  D. Pencitraan Indonesia (1) Strategi Pencitraan Indonesia (a) Perencanaan Pencitraan Indonesia (2) Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang (a) Promosi Media (b) Sarana dan Distribusi Media (3) Kerjasama dan Kemitraan (a) Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah (b) Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Non-Pemerintah	Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka	Eselon IV  Eselon IV  Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA  DISPORA  DISPORA

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
4	E. Promosi Konvensi, Insentif, event, dan minat khusus (3) Promosi Minat Khusus (a) Wisata Bahari (b) Wisata Non Bahari	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
	A. Pengembangan industri Perfilman (1) Fasilitas Industri Perfilman (a) Fasilitas Usaha Perfilman (b) Fasilitas Kegiatan Perfilman (2) Festival dan Eksibisi Film (a) Festival Film (3) Produksi (a) Pelayanan Produksi Film (4) Pemasaran Film (a) Pertunjukan Film	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
5	B. Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik (1) Pengembangan Seni Pertunjukan (a) Kreasi dan Produksi Seni Pertunjukan (b) Fasilitas Pengembangan Seni Pertunjukan (2) Pengembangan Industri Musik (a) Kreasi dan Produksi Musik (b) Fasilitas Pengembangan Industri Musik (3) Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
	C. Pengembangan Seni Rupa (1) Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan, Fotografi  (a) Kreasi dan Produksi Karya Seni (b) Fasilitas Pengembangan Seni (2) Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi (b) Apresiasi Karya Seni Rupa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
	A. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	DISPORA



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
XII	D. Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (1) Program dan Evaluasi (2) Evaluasi dan Kerjasama	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
	1 Kebijakan Kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
	2 Rehabilitasi Sosial A Kesejahteraan sosial anak 1) Kesejahteraan sosial anak balita a. Pengangkatan anak b. Pengasuhan anak balita 2) Kesejahteraan sosial anak terlantar a. Pengasuhan anak dalam keluarga b. Pengasuhan anak dalam lembaga	Biasa/Terbuka     Biasa/Terbuka	Eselon IV     Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial  Dinas Sosial
	3) Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum a. Perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum b. Pengembangan remaja 4) Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus a. Kelembagaan dan penguatan keluarga b. Aksesibilitas anak dengan kecacatan	Biasa/Terbuka   Biasa/Terbuka	Eselon IV   Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial  Dinas Sosial
	B Rehabilitasi sosial 1) Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit a. Dalam penantian b. Luar panti 2) Kelembagaan dan advokasi sosial 3) Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial	Biasa/Terbuka   Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV   Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial  Dinas Sosial
	C Rehabilitasi sosial tuna sosial				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	1) Gelandangan dan pengemis 2) Tuna susila dan korban <i>trafficking</i> perempuan 3) Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan a. Penyiapan b. Reintegrasi 4) Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas  D Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA 1) Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat  2) Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi E Pelayanan sosial lanjut usia  1) Pelayanan sosial dalam dan luar panti 2) Pengembangan kelembagaan a. Pembinaan lembaga b. Kerjasama lembaga 3) Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka  Terbatas   Biasa/Terbuka  Terbatas  Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV  Eselon III   Eselon III  Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial  Dinas Sosial  Dinas Sosial  Dinas Sosial
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial A Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial 1) Bimbingan dan standardisasi 2) Perizinan dan pengumpulan B Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran C Perlindungan sosial korban bencana sosial 1) Ketahanan sosial masyarakat a. Kerasian sosial b. Penguatan sumber daya 2) Tanggap darurat a. Bantuan darurat b. Advokasi sosial 3) Pemulihan sosial	Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka	Eselon IV  Eselon IV  Eselon IV  Eselon IV  Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang	Dinas Sosial  Dinas Sosial  Dinas Sosial  Dinas Sosial  Dinas Sosial

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	a. Penguatan sosial b. Reintegrasi sosial 4) Kerjasama a. Kerjasama Pemerintah b. Kerjasama Non Pemerintah D Perlindungan sosial korban bencana alam 1) Kesiapsiagaan dan mitigasi 2) Tanggap darurat a. Bantuan darurat b. Advokasi sosial 3) Pemulihan sosial dan penguatan sosial 4) Kerjasama a. Kerjasama Pemerintah b. Kerjasama Non Pemerintah E Jaminan sosial 1) Seleksi dan verifikasi 2) Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan a. Pendampingan b. Penyaluran 3) Kerjasama a. Kerjasama Pemerintah b. Kerjasama Non Pemerintah	Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka	Eselon IV  Eselon IV  Eselon IV Eselon IV  Eselon IV Eselon IV  Eselon IV Eselon IV  Eselon IV	mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial  Dinas Sosial  Dinas Sosial  Dinas Sosial  Dinas Sosial
4	Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan A Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial 1) Ketahanan keluarga a. Bimbingan kesejahteraan sosial keluarga b. Konsultasi dan Advokasi keluarga 2) Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial  3) Kemitraan dunia usaha a. Kerjasama b. Bimbingan sosial 4) Karang taruna a. Kelembagaan b. Pengembangan kapasitas B Pemberdayaan komunitas adat terpencil 1) Persiapan pemberdayaan	Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka	Eselon IV  Eselon IV  Eselon IV  Eselon IV  Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang	Dinas Sosial  Dinas Sosial  Dinas Sosial  Dinas Sosial

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	a. Identifikasi b. Analisis 2) Pemberdayaan sumber daya manusia a. Pemberdayaan sumber daya manusia adat terpencil b. Pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil  3) Penggalian dan pengembangan potensi a. Penggalian potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan  b. Pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan  4) Keserasian dan penguatan komunikasi adat terpencil a. Keserasian sosial b. Penguatan sosial 5) Kerjasama kelembagaan a. Kerjasama kelembagaan b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan C Penanggulangan kemiskinan perkotaan dan perdesaan 1) Identifikasi dan analisis 2) Pengembangan kapasitas a. Pengembangan kapasistas sumber daya manusia b. Pengembangan kapasitas usaha	Biasa/Terbuka	Eselon IV	mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
	b. Pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
	4) Keserasian dan penguatan komunikasi adat terpencil a. Keserasian sosial b. Penguatan sosial	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
	5) Kerjasama kelembagaan a. Kerjasama kelembagaan b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
	C Penanggulangan kemiskinan perkotaan dan perdesaan 1) Identifikasi dan analisis 2) Pengembangan kapasitas a. Pengembangan kapasistas sumber daya manusia b. Pengembangan kapasitas usaha	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
	D Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial 1) Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan a. Pengangkatan b. Penghargaan c. Kesejahteraan  2) Pelestarian nilai - nilai kepahlawanan dan keperintisan a. Identifikasi b. Pendayagunaan 3) Pengembangan kesetiakawanan sosial a. Penggalian nilai b. Pelestarian nilai 4) Pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
	b. Pelestarian nilai	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
	3) Pengembangan kesetiakawanan sosial a. Penggalian nilai b. Pelestarian nilai	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
	4) Pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.	Dinas Sosial

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
XIII	a. Pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama b. Standardisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional			Tanah Bumbu	
	<b>URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI</b>				
	A. PERUMUSAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	B. PERENCANAAN TENAGA KERJA 1. Perencanaan Tenaga Kerja Makro a. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah  2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	2. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro a. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah 1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah  2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja 3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja b. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta 1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Swasta  2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja 3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	C. PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS				



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	1. Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Standarisasi Kompetensi               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penerapan Standar Kompetensi</li> <li>2) Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi</li> <li>3) Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pelatihan Ketenagakerjaan</li> <li>Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan</li> </ul> </li> <li>4) Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan</li> <li>Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan</li> </ul> </li> <li>5) Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pelatihan Ketransmigrasian</li> <li>Penyusunan Materi Pelatihan Ketransmigrasian</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>b. Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja</li> <li>Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan</li> </ul> </li> <li>2) Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan</li> <li>Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	3) Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> <li>Standar Mutu Lembaga Pelatihan</li> <li>Bimbingan Penerapan Standar Mutu</li> <li>4) Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga               <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem Pendanaan Pelatihan</li> <li>Kerjasama Antar Lembaga</li> </ul> </li> <li>c. Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga</li> <li>Pengembangan Karir Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan</li> </ul> </li> <li>2) Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta</li> </ul> </li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta  Pengembangan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta  3) Tenaga Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan 4) Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan  Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan Penyebaran Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan  d. Bina Pemagangan 1) Pemagangan Dalam Negeri Program Pemagangan Dalam Negeri Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri 2) Pemagangan Luar Negeri Program Pemagangan Luar Negeri Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Luar Negeri 3) Perizinan dan Advokasi Pemagangan Perizinan dan Rekomendasi Advokasi dan Perlindungan 4) Promosi dan Jenjang Pemagangan Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan Pemagangan Jejaring Pemagangan				
	e. Produktivitas dan Kewirausahaan 1) Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan Promisi Produktivitas dan Kewirausahaan Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan  2) Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas Sistem dan Metode Produktivitas Alat dan Teknik Peningkatan Produktivitas 3) Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas Pengukuran Produktivitas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div>Kajian Produktivitas</div> <div>4) Pengembangan Kewirausahaan Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Bimbingan Konsultasi</div> <div>5) Transmigrasi</div> <div>6) Nama dan alamat Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berkerja pada Perusahaan di Kalimantan Selatan</div> <div>D. PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA</div> <div>1. Pengembangan Pasar Kerja</div> <div>    a. Informasi Pasar Kerja</div> <div>        1) Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri</div> <div>        2) Informasi Pasar Kerja Luar Negeri</div> <div>    b. Analisis Pasar Kerja</div> <div>        1) Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri</div> <div>        2) Analisis Pasar Kerja Luar Negeri</div> <div>    c. Bursa Kerja</div> <div>        1) Bursa Kerja Dalam Negeri</div> <div>        2) Bursa Kerja Luar Negeri</div> <div>    d. Analisis Jabatan</div> <div>        1) Analisis dan Informasi Jabatan</div> <div>        2) Pengembangan Sistem Analisis Jabatan</div>	<div>Biasa/Terbuka</div> <div>Terbatas</div> <div>Terbatas</div> <div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div> <div>Eselon III</div> <div>Eselon III</div> <div>Eselon IV</div>	<div>Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div> <div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div> <div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div> <div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div>
	<div>2. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri</div> <div>    a. Antar Kerja</div> <div>        1) Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)</div> <div>        2) Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja</div> <div>    b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus</div> <div>        1) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita</div> <div>        2) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia</div> <div>    c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</div> <div>        1) Penyuluhan Jabatan</div>	<div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div>	<div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	2) Bimbingan Jabatan d. Pemberdayaan Pengantar Kerja 1) Pengembangan Kompetensi Pengantar Kerja 2) Kerjasama antar Lembaga 3. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri a. Kelembagaan Penempatan 1) Perizinan Kelembagaan 2) Evaluasi Kinerja b. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 1) Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI 2) Fasilitasi Penyediaan TKI c. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 1) Advokasi dan Kepulangan 2) Sarana dan Perlindungan d. Kerjasama Internasional 1) Kerjasama Bilateral 2) Kerjasama Regional dan Multilateral  4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal a. Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal 1) Tenaga Kerja Mandiri 2) Tenaga Kerja Sektor Informal b. Pengembangan Padat Karya 1) Padat Karya Perdesaan 2) Padat Karya Perkotaan c. Terapan Teknologi Tepat Guna	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	1) Pengembangan Teknologi Tepat Guna 2) Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna d. Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga  1) Pemberdayaan Pendampingan 2) Kerjasama Antar Lembaga  5. Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing a. Analisis dan Perizinan Sektor Industri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.	DISNAKERTRANSKOP dan UM

<b>NO.</b>	<b>JENIS/ SERIES ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	1) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri  2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri <b>b. Analisis dan Perizinan Sektor Jasa</b> 1) Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa  2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa  <b>c. Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan</b> 1) Pengendalian 2) Kerjasama Kelembagaan  <b>6. Standardisasi Profesi</b> <b>a. Sistem Informasi dan Registrasi</b> 1) Dokumen yang berhubungan dengan sistem informasi dan registrasi 2) Dokumen yang berhubungan dengan Sertifikasi kompetensi kerja <b>b. Pembakuan Akreditasi</b> 1) Dokumen yang berhubungan dengan kompetensi dan akreditasi 2) Dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan  <b>E. PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA</b> <b>1. Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi</b> <b>a. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama</b>  1) Peraturan Perusahaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tanah Bumbu           Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	2) Perjanjian Kerja Bersama <b>b. Perjanjian Kerja</b> <b>c. Kesejahteraan Pekerja</b> 1) Program Kesejahteraan 2) Fasilitas Kesejahteraan <b>d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja</b> 1) Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	2) Perjanjian Kerja Bersama <b>b. Perjanjian Kerja</b> <b>c. Kesejahteraan Pekerja</b> 1) Program Kesejahteraan 2) Fasilitas Kesejahteraan <b>d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja</b> 1) Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div>2) Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja</div> <div>2. Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial<div>a. Organisasi Pekerja dan Pengusaha<div>1) Organisasi Pekerja</div><div>2) Organisasi Pengusaha</div></div><div>b. Kelembagaan Hubungan Industrial<div>1) Lembaga Kerjasama BIPARTIT</div><div>2) Lembaga Kerjasama TRIPARTIT</div></div><div>c. Pemasyarakatan Hubungan Industrial<div>1) Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial</div><div>2) Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial</div></div></div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	<div>3. Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial<div>a. Pengupahan<div>1) Usulan penetapan upah minimum Bupati/Walikota kepada Gubernur</div><div>2) Usulan pengguhan pelaksanaan upah minimum dari Dunia Usaha kepada Gubernur</div><div>3) Penerapan Standar Pengupahan</div><div>4) Pengurusan Pengupahan</div></div></div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	<div>b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja<div>1) Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja</div><div>2) Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja</div></div> <div>4. Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.	DISNAKERTRANSKOP dan UM

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pencegahan Dini</li> <li>2) Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan</li> </ul> </li> <li>b. Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial</li> <li>2) Evaluasi dan Pelaporan</li> </ul> </li> <li>c. Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator,</li> <li>2) Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan</li> </ul> </li> </ul> <p>F. PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan Norma Kerja                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat</li> <li>2) Pengawasan Norma Pengupahan</li> </ul> </li> <li>b. Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan Norma Hubungan Kerja</li> <li>2) Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat</li> </ul> </li> <li>c. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri</li> <li>2) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri</li> <li>3) Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	<p>Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan Norma Kerja Perempuan                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi</li> <li>2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	DISNAKERTRANSKOP dan UM

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pengawasan Norma Kerja Anak <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan</li> <li>2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak</li> </ul> </li> <li>c. Kerjasama Lintas Sektoral <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan</li> <li>2) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anak</li> </ul> </li> <li>d. Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Advokasi Tenaga Kerja Perempuan</li> <li>2) Advokasi Tenaga Kerja Anak</li> </ul> </li> </ul> <p>3. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan Norma Mekanik</li> <li>2) Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan</li> </ul> </li> <li>b. Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan</li> <li>2) Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran</li> </ul> </li> <li>c. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja</li> <li>2) Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja</li> </ul> </li> <li>d. Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan Norma Lingkungan Kerja</li> <li>2) Pengawasan Norma Bahan Berbahaya</li> </ul> </li> <li>e. Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3 <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3</li> <li>2) Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3</li> </ul> </li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	<p>4. Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan</p> <p>5. Bina Penegakan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	DISNAKERTRANSKOP



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	1) Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 2) Penindakan Norma Ketenagakerjaan b. Penyidikan Norma Ketenagakerjaan 1) Teknis Penyidikan Norma Ketenagakerjaan 2) Administrasi Penyidikan Norma Ketenagakerjaan c. Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 1) Pemberdayaan PPNS 2) Sarana dan Prasarana PPNS d. Kerjasama Penegakan Hukum 1) Kerjasama Lembaga Penegakan Hukum 2) Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan e. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan (Nota pemerikaan dan BAP)  G. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 1. Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) a. Pengkajian K3 1) Analisis dan Standardisasi bidang K3 2) Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih b. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3 2. Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 a. SDM K3 1) Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan 2) Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 b. Kompetensi K3 1) Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan 2) Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan 4) Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM	Biasa/Terbuka	Eselon IV	mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	dan UM  DISNAKERTRANSKOP dan UM
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	5) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3  H. KETRANSMIGRASIAN				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	1. Perencanaan dan Pemberdayaan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencadangan areal untuk pemukiman Transmigrasi</li> <li>b. Peta lokasi Transmigrasi</li> <li>c. Data lahan Transmigrasi</li> <li>d. Rencana strategis pembangunan Transmigrasi</li> <li>e. Penyusunan rencana satuan kawasan pengembangan</li> </ul> 2. Pengembangan kawasan, pengerahan dan penempatan penduduk <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usulan penempatan Transmigrasi</li> <li>b. Peta lahan Transmigrasi</li> <li>c. Peta lahan eks lokasi Transmigrasi</li> <li>d. Pembangunan infrastruktur lokasi Transmigrasi</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
<b>XV</b>	<b>URUSAN KESEHATAN</b>				
1	PERUMUSAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan <ul style="list-style-type: none"> <li>A Pengkajian dan pengusulan kebijakan</li> <li>B Penyiapan bahan</li> <li>C Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</li> <li>D Pengumpulan dan pengolahan data</li> <li>E Penetapan dalam bentuk nspk dan standarisasi</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
2	UPAYA KESEHATAN A Upaya Kesehatan Dasar <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pelayanan Kedokteran Keluarga</li> <li>(2) Praktik Klinis Bagi Dokter di Fanyaskes Primer</li> <li>(3) Pelaksanaan Kesehatan Primer</li> <li>(4) Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas</li> <li>(5) Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit</li> <li>(6) ICD 10, Destistry &amp; Stomatology</li> <li>(7) Infeksi Menular Lewat Tranfusi Darah</li> <li>(8) Penyakit Mulut di Tingkat Primer</li> <li>(9) Pembiayaan Darah</li> <li>(10) Penggunaan Darah Rasional</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	(11) Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring (12) Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, sangat terpencil dan (13) Akreditasi Puskesmas				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(14) Puskesmas Berprestasi  B Upaya Kesehatan Rujukan (1) Pelayanan Kesehatan Rujukan (a) Rumah Sakit Bergerak (b) Rumah Sakit Pratama (c) Rumah Sakit Publik (d) Rumah Sakit Privat (e) Rumah Sakit Khusus (2) Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya (3) Pelayanan Rumah Sakit Privat (a) Akses Pelayanan SPGDT Call 119 (b) Akses Pelayanan Reayasa Jaringan dan Sel Punca (c) Pelayanan Geriartri (d) Pelayanan Medical Tourism (e) Pelayanan Hyperbarik (4) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan (a) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan (b) Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri (5) Badan Pengawas di Rumah Sakit (6) Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan (Penanam (a) Usulan Penetapan atau Peningkatan Kelas dari Pemilik RS atau Pimpinan Badan Hukum Rumah Sakit (b) Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi (c) Profil dan data Rumah Sakit 3 (tiga) Tahun Terakhir (d) <i>Self Instrumen Assesment</i> sesuai dengan kelas yang diajukan (e) Keputusan Penetapan Kelasa (Jika peningkatan kelas) (f) Ser Sertifikat Lulus Akreditasi (Jika Peningkatan Kelas) (7) Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain (a) Akreditasi Rumah Sakit Standar Internasional (JCI) (b) Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional (c) Rumah Sakit Pasca Akreditasi Nasional (d) <i>Surveyor</i> Akreditasi Rumah Sakit	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	C Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan (1) Mikrobiologi dan Imunologi (a) Laboratorium Kseshatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(b) Laboratorium Klinik (c) Laboratorium Puskesmas (d) Laboratorium Mikrobiologi Kultur (2) Patologi dan Toksikologi (a) PNPME (b) Sarana Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) (3) Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (a) Kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK (b) Kalibrasi Rumah Sakit (c) Kalibrasi Puskesmas (d) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Rumah Sakit (e) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Puskesmas (4) Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) (a) ASPAK Rumah Sakit (b) ASPAK Puskesmas (c) ASPAK Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota  D Kesehatan Jiwa (1) Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan (a) Kesehatan Jiwa di Desa Siaga (b) Kegawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (c) Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer  (2) Etikolegal dan Asesmen (a) Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan Serta Penanganan Salah Lainnya Terhadap Orang Dengan Penderita Gangguan Jiwa  (b) Visum Et Repertum (3) Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko (a) Kesehatan Jiwa Di Sekolah (b) Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana (c) Penanggulangan Autisme (d) Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko (e) Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	(e) Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
3	<p>PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN</p> <p>A Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra</p> <p>(1) Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB)</p> <p>(a) Difteri</p> <p>(b) Polio</p> <p>(c) Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre TAS filariasis</p> <p>(d) Surveilans influenza</p> <p>(e) Keracunan Pangan</p> <p>(2) Imunisasi</p> <p>(a) Pekan Imunisasi Nasional</p> <p>(b) Coldchain Bagi Petugas Imunisasi</p> <p>(c) In</p> <p>(d) Imunisasi bagi Petugas Kesehatan</p> <p>(e) Imunisasi di Daerah Sulit</p> <p>(f) Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS)</p> <p>(g) Imunisasi bagi masyarakat umum</p> <p>(h) Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanangan vaksin baru DPT-HIB-Hib</p> <p>(i) Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HIB B/ Haemophilis Influenza tipe B</p> <p>(4) Kesehatan Matra</p> <p>(a) Mudik Sehat</p> <p>(b) Kesehatan bagi Penumpang Darat, Penumpang Kapal Laut dan Penumpang Pesawat Udara</p> <p>(c) Kesehatan Migran</p> <p>(d) Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik</p> <p>(e) Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas</p> <p>(f) Kesehatan Transmigrasi bagi tenaga kesehatan</p> <p>B Pengendalian Penyakit Menular Langsung</p> <p>(1) Pengendalian Tuberkulosis</p> <p>(a) Pengendalian Penyakit TB</p> <p>(b) TB Multi Drug Resitance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB.</p> <p>(c) Laboratorium TB</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan</p>
	(2) Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<p>(a) Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) / <i>Integrated Bio-Behavioural Surveillance</i> (IBBS)</p> <p>(b) <i>Human Immuno Deficiency Virus</i> (HIV)</p> <p>(c) Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), Konseling dan Test</p> <p>(d) Obat <i>Anti Retro Viral</i> (ARV) dan reagen tes HIV</p> <p>(3) Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut</p> <p>(a) <i>Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus</i> (MERS CoV)</p> <p>(b) Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)</p> <p>(4) Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan</p> <p>(a) Diare</p> <p>(b) Tifoid</p> <p>(c) Hepatitis</p> <p>(5) Pengendalian Kusta dan Frambusia</p> <p>(a) Kusta</p> <p>(b) Frambusia</p> <p>(c) Aliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK)</p> <p>C Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang</p> <p>(1) Pengendalian Malaria</p> <p>(a) Kelambu berinsektisida (LLINs)</p> <p>(b) Eliminasi malaria</p> <p>(c) Crosschecker mikroskopis malaria</p> <p>(2) Pengendalian Arbovirolesi</p> <p>(a) DBD</p> <p>(b) Chikungunya</p> <p>(c) Ebola</p> <p>(3) Pengendalian Zoonosis</p> <p>(a) Penyakit flu burung</p> <p>(b) Vaksin Anti Rabies (VAR) baru</p> <p>(c) Penyakit Pes</p> <p>(d) Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1)</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(4) Pengendalian Filariasis dan Kecacingan (a) Filariasis (b) Kecacingan (c) Schistosomiasis (5) Pengendalian Vektor  D Pengendalian Penyakit Tidak Menular (1) Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (a) Penyakit Jantung (b) Penyakit Pembuluh darah (c) Penyakit Hipertensi (d) Penyakit Stroke (2) Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik (a) Penyakit Diabetes Mellitus (b) Penyakit gangguan Metabolik (c) Penyakit gangguan Tiroid (d) Gangguan Obesitas (3) Pengendalian Penyakit Kanker (4) Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif (a) Penyakit Akibat produk tembakau (b) Asma, Lupus, Thalassemia (5) Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan  (a) Pengendalian Cidera (b) Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas (c) Penanganan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan  E Penyehatan Lingkungan (1) Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar (a) Pengawasan Kualitas Air Minum (b) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (2) Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum (a) Higiene sanitasi dan Bangunan Umum (b) Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan (c) Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum (3) Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat (a) Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(b) Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan (c) Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat (d) Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar (4) Higiene Sanitasi Pangan (a) Makanan Jajanan (b) Restoran / Rumah Makan (c) Jasa Boga (d) Depot Air Minum (5) Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi (a) Medis Fasyankes (b) Limbah Medis (Free Mercury) (c) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (d) Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion				
4	GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK A Gizi (1) Gizi Makro (a) Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK, Stunting) (b) Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu) (2) Gizi Mikro (a) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI (Gangguan (b) Manajemen Taburia (c) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya (3) Gizi Klinik dan Dietetik (a) Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi  (b) Tatalaksana Anak Gizi Buruk (c) Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih (4) Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan (a) Makanan Pendamping ASI (b) ASI Eksklusif (c) Pedoman Gizi Seimbang (d) Makanan Bayi dan Anak	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(e) Buffer Stock Makanan Pendamping ASI				
	(f) Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang (g) Makanan Tambahan Anak Sekolah (5) Kewaspadaan Gizi (a) Surveilans Gizi (b) Epidemiologi Kasus Gizi Buruk (c) Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana (d) Jejaring Informasi Pangan dan Gizi  B Kesehatan Ibu (1) Kesehatan Ibu Hamil (a) Pelayanan Antenatal Terpadu (b) Pelayanan Kelas Ibu Hamil (c) Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)  (2) Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas (a) Kemitraan Bidan dan Dukun (b) Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) (c) Supervisi Fasilitatif (3) Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi (a) Audit Maternal Perinatal (b) Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan Masyarakat (c) Tanda Bahaya pada Kehamilan (d) Surveilans Kematian Ibu (4) Keluarga Berencana (a) Pelayanan KB Pasca Persalinan (b) Pelatihan KB Pasca Persalinan (5) Perlindungan Kesehatan Reproduksi (a) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) (b) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM Kespro) (c) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(d) Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)				
	<p>C Kesehatan Anak</p> <p>(1) Kelangsungan Hidup Bayi</p> <p>(a) Pelayanan Kesehatan Neonatal</p> <p>(b) Manajemen Asfeksia</p> <p>(c) Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)</p> <p>(d) Pencegahan Infeksi</p> <p>(2) Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah</p> <p>(a) Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang)</p> <p>(b) Rujukan Tumbuh Kembang</p> <p>(c) Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT)</p> <p>(3) Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko</p> <p>(a) Screening Hypotheroid Congenital</p> <p>(b) Surveillance Kesehatan Anak</p> <p>(c) Surveillance Kesehatan Bawaan</p> <p>(4) Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja</p> <p>(a) Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit</p> <p>(b) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja</p> <p>(c) Usaha Kesehatan Sekolah</p> <p>(5) Perlindungan Kesehatan Anak</p> <p>(a) Korban kekerasan terhadap anak</p> <p>(b) Anak dengan disabilitas</p> <p>(c) Anak terlantar/anak jalanan di panti</p> <p>(d) Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan</p> <p>(e) Anak kelompok terasing/kelompok minoritas</p> <p>D Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer</p> <p>(1) Kesehatan Tradisional Keterampilan</p> <p>(a) Akupresure</p> <p>(b) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(c) Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes (d) Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya				
	(2) Kesehatan Tradisional Ramuan (a) Health Tourism (b) Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA)  (c) Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) (d) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional (e) Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes (3) Kesehatan Alternatif dan Komplementer (a) Akupunktur (b) Obat Herbal / Obat Tradisional (c) Integrasi Yankestrad (d) Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya (4) Penapisan dan Kemitraan (a) Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (b) Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan (c) Penapisan Pengobat Tradisional Asing (d) Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer (e) Pengobat Tradisional (Lokal) (f) Asosiasi Pengobat Tradisional  E Kesehatan Kerja dan Olahraga (1) Pelayanan Kesehatan Kerja (a) Penyakit Akibat Kerja (b) Pemeriksaan Kesehatan Pekerja (c) Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) (2) Kapasitas Kerja (a) Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (b) Kapasitas Kesehatan Kerja (c) TP ASI (3) Lingkungan Kerja (a) Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(b) K3 Perkantoran (c) K3 Rumah Sakit (d) K3 Puskesmas (e) Biomonitoring Efek Kesehatan (f) Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan				
5	(4) Kemitraan Kesehatan Kerja (a) Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja (b) Kesehatan nelayan (c) Integrasi pos UKK (d) Kabupaten/kota percontohan (e) Penguatan profesi (5) Kesehatan Perkotaan (a) Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan (b) Forum Kota (6) Kesehatan Olahraga (a) Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja (b) Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji (c) Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah (d) Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas (e) Olahraga Bagi Usia Lanjut (f) Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat  KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN A Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, Analisis, Pemantauan & Evaluasi) (2) Pengadaan Obat (a) Pengadaan Vaksin Reguler (b) Obat <i>Esensial</i> (c) Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan Nasional  (d) Obat Program Malaria (e) Obat Program Kesehatan Anak (f) Obat Program Kesehatan Ibu (g) Obat Program Gizi (h) Obat Anti Tuberkulosis (i) Obat Program Percepatan Pembangunan Kesehatan Tanah Papua	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(j) Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia (k) Obat Penderita <i>Thalassemia</i> (l) Obat Psikotropika Generik (m) Obat <i>Anti Retro Viral</i> (3) Perbekalan Kesehatan (a) Gudang Farmasi (b) Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan				
	(c) Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan (d) Pengadaan Reagen Screening Darah (e) Obat <i>Buffer Stock</i> (f) Hasil <i>Stock Opname</i> Obat  B Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan (1) Alat Kesehatan (a) Alat kesehatan (b) Kependium alat kesehatan (c) Pelabelan alat kesehatan dan PKRT (d) Post Market & Surveillance alat kesehatan (e) Produk alat kesehatan elektromedik (f) Produk alat kesehatan non elektromedik (2) Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat (a) Industri Farmasi (b) Pedagang Besar Farmasi (c) Pedagang Eceran Obat (d) Penyalur Alat Kesehatan (e) Toko Alat Kesehatan (f) Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan (3) Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (a) Produk Diagnostik In Vitro (b) Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (c) PKRT Klas III (d) PKRT Klas I dan II (e) Perusahaan Rumah Tangga PKRT (f) Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga (g) Post Market & Surveillance PKRT	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	C Kefarmasian ( Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional)  (4) Penggunaan Obat Rasional (a) Obat Rasional (b) Informasi Obat (c) Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik (d) Pemantauan Terapi Obat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	D Produksi dan Distribusi Kefarmasian (1) Obat Tradisional (a) Farmakope Indonesia (b) Farmakope Herbal Indonesia (c) Suplemen I Farmakope Indonesia (d) Suplemen II Farmakope Indonesia (e) Suplemen II Farmakope Indonesia (f) Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia (g) Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia (h) Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia (i) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (j) Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) (k) Usaha Jamu Gendong (UJG) (l) Usaha Jamu Racik (UJR) (m) Farmakope Herbal Indonesia & Suplemennya Versi Bahasa Inggris (2) Kosmetik dan Makanan (a) Keamanan Pangan (b) Kosmetika bagi Petugas (c) Industri Rumah Tangga bagi Petugas (d) Makanan Jajanan Anak Sekolah (e) Kodeks Kosmetika Indonesia (f) Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
7	PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN A Pencegahan, Mitigasi,Kesiapsiagaan (1) Pencegahan dan Mitigasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(2) Kesiapsiagaan B Tanggap Darurat dan Pemulihan (1) Tanggap Darurat (2) Pemulihan C Pemantauan dan Informasi (1) Pemantauan (2) Informasi D Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit E Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana				
8	PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN A Tersedianya data NHA Setiap Tahun B Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
9	KESEHATAN HAJI A Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji (1) Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji (2) Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota (3) Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debarkasi atau KKP  (4) Pelayanan Kesehatan Embarkasi (5) Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) (6) Rekrutmen Tenaga Musiman B Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji (1) Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji (2) Kesehatan Haji di Kab/kota (3) Kesehatan Haji Terpadu (4) Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji (5) Vaksinasi jamaah Haji (6) Sanitasi Asrama Haji (7) Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi	Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka	Eselon IV  Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan  Dinas Kesehatan
10	PROMOSI KESEHATAN A Sarana Promosi Kesehatan (1) Booklet (2) Poster (3) Leaflet	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(4) Pamflet (5) Lembar Balik (6) Selebaran (7) Buletin (8) Festival (9) Lomba (10) Pameran (11) Seminar (12) Iklan Layanan Masyarakat (13) Film				
	(14) Radio Spot				
	B Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran  (1) Saka Bhakti Husada (2) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (3) Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan  (4) Kawasan Tanpa Rokok (5) Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan (6) Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan (7) Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan  (8) Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung Kesehatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	C Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan (1) Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan (2) Kampanye Promosi Kesehatan (3) Video Animasi Promosi Kesehatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	D Hari Kesehatan (1) Hari Kesehatan Nasional (2) Hari Kesehatan Dunia (3) Hari tanpa Tembakau se-Dunia (4) Hari-hari Besar Kesehatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
11	DATA DAN INFORMASI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	Dinas Kesehatan



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	A Statistik Kesehatan (1) Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan (2) Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan  B. Analisis dan Diseminasi Informasi (1) Analisis Data Kesehatan (2) Diseminasi Informasi Kesehatan  C Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan (1) Pengembangan Sistem Informasi (2) Bank Data			mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
	D Identitas Penderita HIV/AIDS	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	E Dokumen Rekam Medis Termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	F Laporan Kasus/Diagnosis Penyakit Pasien	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	G Identitas Subjek Penelitian Dalam Rangka Pengembangan Kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	H Rahasia Kedokteran, Yaitu Penemuan Dokter Dalam Rangka Pengobatan dan Dicatat Dalam Rangka Medis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	I Hasil Audit Medik Pada Sarana Kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	J Hasil Audit Terkait Dengan Medical Error	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	K Pelepasan Informasi Medis Untuk Kepentingan Klaim Asuransi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
<b>XVI</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>				
1	KEBIJAKAN Kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan dalam negeri , kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, bina pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta keuangan daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Kesbang Pol
2	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK A  Pembinaan ideologi dan Pengendalian 1) Pembinaan ideologi Pancasila, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik dan kemasyarakatan 2) Laporan keadaan politik 3) Pemberlakuan keadaan bahaya dan jam malam (a) Pemberitahuan (b) Ketentuan pelaksanaan ( c) Pengawasan 4) Monitoring dan evaluasi mengenai keadaan IPOLEKSOSBUD  B Pembinaan Partai Politik 1) Data dan kepengurusan parpol 2) Agenda kerja aktivitas parpol 3) Monitoring kegiatan parpol  C Pengawasan Organisasi Terlarang 1) Pendirian, pembubaran dan pengawasan partai/organisasi terlarang	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Kesbang Pol
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Kesbang Pol
		Rahasia		Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan	Kesbang Pol

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	2) Daftar dan data pengurus anggota partai/organisasi terlarang 3) Pemutihan bagi anggota partai/organisasi terlarang 4) Izin meninggalkan tempat atau pindah domisili bagi anggota partai/organisasi terlarang 5) Daftar organisasi terlarang 6) Laporan mengenai organisasi terlarang D Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Organisasi kemasyarakatan terdiri dari organisasi berdasarkan kesamaan kegiatan dan agama/kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Kesbang Pol
	E Pembinaan Wawasan Kebangsaan F Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu dan PILKADA 1) Fasilitasi pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2) Fasilitasi pelaksanaan pemilu anggota legislatif 3) Fasilitasi pemilihan kepala daerah 4) Daftar organisasi peserta pemilu (OPP) 5) Fasilitasi pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan daftar pemilih 6) Fasilitasi pengamanan dan pengendalian masa kampanye 7) Fasilitasi dan mediasi sengketa pemilu/PILKADA G Penanganan Konflik Terorisme Data narapidana teroris pada lembaga pemasyarakatan H Kegiatan Intelijen Terkait Dengan Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Keamanan Serta Penanganan Kasus Yang Mengganggu Masyarakat 1) Penanganan . . . . . Terorisme	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Rahasia Rahasia	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan	Kesbang Pol Kesbang Pol Kesbang Pol Kesbang Pol

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
3	2) Arsip daftar orang yang masuk G 30 S PKI dan organisasi terlarang lainnya 3) Data narapidana teroris pada lembaga pemasyarakatan  PEMERINTAHAN UMUM A Lambang 1) Sayembara 2) Penetapan penggunaan lambang  3) Ketentuan mengenai lambang pada logo, pataka bentuk dinas, lembaga dan organisasi lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	reputasi  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Bagian Pemerintahan
	B Pemerintah Pusat 1) Susunan kabinet (a) Pengangkatan menteri  (b) Penunjukan menteri (c) Amanat menteri 2) Dewan pertimbangan otonomi daerah (a) Pembantuan keanggotaan (b) Sekretariat DPOD C Pemerintah Daerah 1) Pembentukan, pemekaran, peningkatan, pemecahan dan penghapusan wilayah daerah 2) Penyelesaian sengketa batas wilayah 3) Administrasi dan dokumentasi perbatasan antar wilayah  4) Pemindahan pusat Pemerintahan 5) Pemberian, penggantian/perubahan nama wilayah 6) Kerjasama antara daerah  7) Pencalonan, pengusulan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah/Wakil kepala daerah 8) Pencalonan, pengusulan, pengesahan, pengangkatan dan	Biasa/Terbuka         Rahasia Rahasia Rahasia  Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka  Terbatas  Terbatas	Eselon IV         Eselon II Eselon II Eselon II  Eselon IV Eselon IV Eselon IV  Eselon III  Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu      Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah	Bagian Pemerintahan      Bagian Pemerintahan   Bagian Pemerintahan  Bagian Pemerintahan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
4	pemberhentian Anggota DPRD			fungsi pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	
	9) Pencalonan, pengusulan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah	Terbatas	Eselon III		
	10) Data anggota DPRD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Pemerintahan
	11) Data rancangan-rancangan keputusan DPRD	Terbatas	Eselon III		
	12) Catatan-catatan, Notulen, Risalah rapat yang dinyatakan tertutup	Terbatas	Eselon III		
	13) Laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Bagian Pemerintahan
	14) Pembinaan lembaga perangkat adat	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	A Data dan Informasi Pemberdayaan Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPMD
	B Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPMD
	C Naskah Ujian Tertulis Bagi Bakal Calon Kepala Desa, Perangkat Desa, Maupun Aparatur Pemerintah Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPMD
	D Pembinaan Lembaga Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPMD
	E Pembinaan Sumber Daya Manusia				
	1) Latihan Pembangunan Desa Terpadu (LPDT)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPMD
	2) Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)				
	F Pembinaan Partisipasi Masyarakat				
	1) Data Proyek Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPMD
	2) Peningkatan Asosiasi LPM				
	G Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	DPMD

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<p>H Pemberdayaan Perempuan dan PKK</p> <p>I Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Kesehatan, HIV, AIDS, LB, Bencana Alam, Narkoba, Masalah Sosial</p> <p>J Pembinaan Anak Remaja</p> <p>1) Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan</p> <p>2) Pembinaan Program Pasca Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>DPMD</p> <p>DPMD</p> <p>DPMD</p>
	<p>K Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga</p> <p>1) Bantuan Pembangunan</p> <p>(a) Program pembangunan desa</p> <p>(b) Program pengembangan kecamatan</p> <p>(c ) Program pengentasan kemiskinan (penyaluran raskin)</p> <p>(d) Dana tentang lokasi PKK dan bantuan pembangunan desa/kelurahan</p> <p>2) Usaha Keluarga</p> <p>(a) Usaha kecil, jasa, kerajinan dan agrobisnis</p> <p>(b) Usaha kecil menengah dan koperasi</p> <p>(c ) Bantuan stimulan (Swasta dan Pemerintah)</p> <p>(d) Optimalisasi hasil kerja/mandiri</p> <p>(e ) Penanggulangan kemiskinan (KPK)</p> <p>3) Data Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Keluarga, Hasil Usaha Masyarakat</p> <p>4) Bantuan Perkreditan</p> <p>(a) Pembinaan usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP)</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>DPMD</p> <p>DPMD</p> <p>DPMD</p> <p>DPMD</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
5	(b) Data usaha simpan pinjam  URUSAN KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA A Perencanaan Umum dan Program Kependudukan 1) Pendaftaran Pendudukan Melalui : (a) Formulir biodata penduduk (b) Formulir permohonan, perpanjangan pembaharuan KTP, KK dan # Mutasi penduduk pengawasan KTP dan Mutasi penduduk  (c ) Formulir permohonan, perlindungan dokumen KTP, KK dan akta-akta adopsi, perubahan penggantian nama, pemalsuan dokumen, pendidikan, sensus kependudukan, warga negara asing	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DISDUKCAPIL
	(d) Pengangkatan pejabat luar biasa catatan sipil dan pembantunya  (e ) Pendaftaran dan perpindahan penduduk WNA (f ) Pendaftaran dab perpindahan WNI (g) Pendaftaran dan perpindahan penduduk pengungsi dan rentan, akibat bencana alam, kerusakan soial, daerah terbelakang  (h) Proses pengangkatan pejabat luar biasa, pencatatan sipil dan pembantunya B Pencatatan Sipil 1) Pencatatan Sipil Melalui (a) Formulir permohonan akta kelahiran perkawinan, perceraian, ganti perubahan nama kenal lahir/mati, adopi, pendidikan sensus kependudukan perubahan pengganti nama, pemalsuan dokumen  (b) Akta kelahiran dan kematian  (c ) Kasus-kasus nikah cerai, rujuk yang meliputi penyelesaian dan	Biasa/Terbuka  Rahasia  Terbatas	Eselon IV  Eselon II  Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu  Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi Memiliki dampak yang dapat	DISDUKCAPIL  DISDUKCAPIL

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<p>laporannya</p> <p>(d) Kewarganegaraan WNA meliputi, permohonan, kelengkapan persyaratan dan penetapannya</p> <p>(e ) Data dan informasi mengenai pencatatan pewarganegaraan non perkawinan dan kelahiran</p> <p>(f ) Catatan kelahiran dan kematian</p> <p>(g) Catatan perkawinan dan perceraian agama islam</p> <p>(h) Catatan perkawinan dan perceraian non islam</p> <p>(i) Catatan perkawinan dan perceraian advokasi perkawinan dan perceraian</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>DISDUKCAPIL</p> <p>DISDUKCAPIL</p> <p>DISDUKCAPIL</p> <p>DISDUKCAPIL</p>
	<p>(j) Indentifikasi dan investarisasi sistem, prosedur dan standar pelayanan pencatatan pengangkatan pengakuan, pengesahan anak, perubahan dan pembatalan</p> <p>(k) Catatan tentang pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak, perubahan dan pembatalan akta</p> <p>(l) Data dan informasi tentang pencatatan kewarganegaraan akibat perkawinan, kelahiran dan non perkawinan</p> <p>(m) Kebijakan dan pedoman teknis pencatatan kewarganegaraan</p> <p>(n) Bahan-bahan monitoring, pemantauan dan evaluasi pencatatan sipil</p> <p>(o) Sistem dokumentasi pencatatan sipil</p> <p>C Informasi Kependudukan</p> <p>1) Pengembangan perakat lunak, keras dan jaringan komunikasi data</p> <p>2) Fasilitas teknis pengembangan perangkat lunak, keras, jaringan komunikasi data</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>DISDUKCAPIL</p> <p>DISDUKCAPIL</p> <p>DISDUKCAPIL</p> <p>DISDUKCAPIL</p> <p>DISDUKCAPIL</p> <p>DISDUKCAPIL</p>



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	3) Manual teknis pengolahan data pendaftaran penduduk dan catatan sipil, daerah maju / berkembang 4) Kebijakan dan pedoman teknis pengolahan data pendaftaran penduduk, biodata, NIK, KTP dan KK 5) Manual teknis pengolahan data kejadian vital meliputi kelahiran, kematian, kedatangan dan perpindahan penduduk 6) Manual teknis pengolahan data penduduk dan non registrasi  7) Manual teknis pengolahan sistem pelayanan media elektronik cetak dan outlet 8) Fasilitas pelayanan media elektronik, cetak dan outlet 9) Bahan-bahan monitoring, pemantauan dan evaluasi informasi kependudukan 10) Sistem dokumentasi informasi kependudukan				
	D Perkembangan Penduduk 1) Struktur dan komposisi penduduk   2) Fertilitas, kesehatan dan reproduksi 3) Morbilitas dan mortalitas penduduk dan fasilitas 4) Data kuantitas penduduk 5) Data kualitas penduduk  6) Pengembangan kualitas anak, remaja, penduduk usia produktif dan lanjut usia 7) Data informasi pengembangan kualitas penduduk 8) Penataan persebaran penduduk antara wil sementara dan migran non permanen 9) Data dan informasi persebaran penduduk 10) Telaahan dan pengkajian sistem perlindungan dan pemberdayaan penduduk 11) Penataan penduduk sementara dan non migran permanen	Terbatas   Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka	Eselon III   Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III  Eselon IV  Eselon IV Eselon IV  Eselon IV Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DISDUKCAPIL   DISDUKCAPIL  DISDUKCAPIL  DISDUKCAPIL  DISDUKCAPIL

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	12) Manual teknis perlindungan penduduk 13) Telaahan dan kajian pengelolaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan sosial budaya 14) Manual teknis pelayanan kelembagaan pemberdayaan masyarakat ekonomi dan sosial budaya 15) Telaahan dan pengkajian pengembangan wawasan kependudukan melalui pendidikan jalur sekolah, luar sekolah dan masyarakat  E Proyeksi dan Penyesuaian Kebijakan Kependudukan 1) Telaahan dan pengkajian pengembangan, dokumentasi, pemanfaatan data kependudukan  2) Kebijakan dan pedoman teknis kependudukan 3) Telaahan dan pengkajian implikasi, analisis, struktur dan komposisi, pemanfaatan proyeksi penduduk	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka  Terbatas  Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV  Eselon IV Eselon IV  Eselon III  Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DISDUKCAPIL  DISDUKCAPIL  DISDUKCAPIL
	4) Data, informasi dan dokumentasi proyeksi penduduk 5) Klasifikasi dan pedoman teknis proyeksi penduduk 6) Telaahan dan pengkajian dampak kependudukan advokasi dan standarisasi 7) Kebijakan dan pedoman teknis analisis dampak kependudukan  8) Telaahan dan pengkajian penyerasian lembaga usaha swasta, masyarakat dan mitra Internasional 9) Penyelesaian lembaga pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota 10) Kebiajakn dan pedoman teknis penyelesaian kelembagaan  F Kewarganegaraan Asing 1) Laporan jumlah WNI keturunan asing	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV  Eselon IV  Eselon IV  Eselon IV  Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan	DISDUKCAPIL  DISDUKCAPIL  DISDUKCAPIL  DISDUKCAPIL  DISDUKCAPIL

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<p>G   Keluarga Berencana</p> <p>1) Kebijakan yang ada hubungannya dengan program Keluarga Berencana</p> <p>2) Pengadaan prasarana dan sarana untuk Keluarga Berencana gedung/bangunan, sarana mobilitas dan sarana lainnya</p> <p>3) Penghargaan terhadap KB lestari</p> <p>4) Pembinaan Keluarga Berencana</p> <p>5) Laporan peserta KB</p> <p>(a) Penggunaan alat kontrasepsi KB, spiral IUD, pil, kondom, sterilisasi/vasektomi</p> <p>6) Data/hasil evaluasi mengenai pelaksanaan KB</p> <p>7) Hasil pertemuan, seminar, survei ilmiah KB</p> <p>8) Laporan kasus masalah KB</p> <p>9) Laporan umum pelaksanaan program KB</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	<p>Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</p>	DISDUKCAPIL
<b>XVII</b>	<b>URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>				
1	<p>KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN</p> <p>A Kebijakan tentang pendidikan dan Pengajaran meliputi: kurikulum, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar, menengah, atas dan pendidikan tinggi</p> <p>B MoU (Memorandum of Understanding)</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</p>	DPDK
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPDK
2	KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
3	<p>PEMBINAAN PENDIDIKAN</p> <p>A Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal</p> <p>(1) Paud</p> <p>(a) Bahan ajar</p> <p>- Alat permainan edukatif</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(b) Pelatihan (c) <i>Block Grant</i> (d) Sosialisasi (e) Peringatan hari anak nasional (2) Pendidikan masyarakat (a) Penyelenggaraan program - Bahan ajar - Penyusunan majalah (b) Pemberian bantuan sosial - Penilaian proposal - Pemberian bansos (c) Pembinaan program - Temu koordinasi - Bintek program/pendampingan - Peningkatan kapasitas kelembagaan (d) Lomba, penghargaan, dan anugerah (e) Peringatan hari anak nasional (f) Pameran/publikasi/sosialisasi				
	(3) Kursus dan pelatihan (a) Per Penyelenggaraan program - Uji kompetensi (akreditasi) - Penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan (LKP) - Pendataan lembaga kursus dan pelatihan - Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra (b) Pemberian bantuan sosial (c) Pembinaan program: bintek, orientasi teknis, dan temu karya (d) Standar kursus dan pelatihan - Kurikulum - Bahan ajar (e) Lomba lembaga kursus berprestasi (f) Publikasi dan promosi kursus (g) Sertifikasi (4) Pendidik dan tenaga pendidikan (a) Bahan ajar (b) <i>Block grant</i>				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(c) Sosialisasi (modul) (d) Data pendidik dan tenaga pendidik  B Pendidikan dasar (1) Sekolah dasar (a) Kurikulum (b) Bahan ajar (c) Pelatihan (d) <i>Block grant</i> (e) Bimbingan teknis/sosialisasi (f) Lomba, sayembara, dan festival (g) Bantuan operasional sekolah [BOS] (h) Bantuan siswa miskin (2) Sekolah menengah pertama (a) Kurikulum (b) Bahan ajar (c) Pelatihan (d) <i>Block grant</i> (e) Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	(f) Lomba, sayembara, dan festival (g) Bantuan operasional sekolah [BOS] (h) Bantuan siswa miskin (3) Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK (a) Bahan ajar (b) Petunjuk teknis (c) <i>Block grant</i> (d) Sosialisasi (e) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore (f) Kurikulum/bahan pembelajaran (g) Alat bantu pembelajaran (h) Pendataan (i) Kelembagaan - Unit kesehatan sekolah - Pendidikan jasmani adaptif - Pendidikan inklusi - <i>Block grant</i> - Bimbingan teknis/sosialisasi				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<p>- Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore</p> <p>(4) Pendidik dan tenaga pendidik</p> <p>(a) Pendataan dan pemetaan</p> <p>(b) Pembinaan guru dan tenaga pendidik</p> <p>(c) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)</p> <p>(d) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah</p> <p>(e) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan</p> <p>(f) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan</p> <p>(g) <i>Block grant</i></p> <p>(h) Bimbingan teknis/sosialisasi</p> <p>C Pendidikan menengah</p> <p>(1) Sekolah menengah atas dan SMK</p> <p>(a) Kurikulum</p> <p>(b) Bahan ajar</p> <p>(c) Pelatihan</p> <p>(d) <i>Block Grant</i></p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	<p>(e) Bimbingan teknis/sosialisasi</p> <p>(f) Lomba, sayembara, dan festival</p> <p>(g) Bantuan operasional sekolah [BOS]</p> <p>(h) Bantuan siswa miskin</p> <p>(2) Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK</p> <p>(a) Bahan ajar</p> <p>(b) Petunjuk teknis</p> <p>(c) <i>Block grant</i></p> <p>(d) Sosialisasi</p> <p>(e) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore</p> <p>(f) Kurikulum/bahan pembelajaran</p> <p>(g) Alat bantu pembelajaran</p> <p>(h) Pendataan</p> <p>(i) Kelembagaan</p> <p>- Unit kesehatan sekolah</p> <p>- Pendidikan jasmani adaptif</p> <p>- Pendidikan inklusi</p>				







NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div>(a) Pengetahuan tradisional</div> <div>(b) Ekspresi budaya tradisional</div> <div>(4) Lingkungan budaya dan pranata sosial</div> <div>(a) Lingkungan budaya</div> <div>(b) Pranata sosial</div> <div>D Sejarah dan nilai budaya</div> <div>(1) Sejarah</div> <div>(a) Penggalian sumber sejarah</div> <div>(b) Penulisan sejarah</div> <div>(2) Pemetaan nilai</div> <div>(a) Pemetaan</div> <div>(b) Klasifikasi</div> <div>(3) Verifikasi dan perumusan nilai</div> <div>(a) Verifikasi nilai</div> <div>(b) Perumusan nilai</div> <div>(4) Dokumentasi dan publikasi</div> <div>(a) Dokumentasi sejarah dan nilai budaya</div> <div>(b) Publikasi sejarah dan nilai budaya</div>	<div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div>	<div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>DPDK</div>
	<div>E Internalisasi nilai dan diplomasi budaya</div> <div>(1) Internalisasi nilai budaya</div> <div>(a) Pengemasan nilai budaya</div>	<div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div>	<div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>DPDK</div>
5	<div>(b) Penanaman nilai budaya</div> <div>(2) Kekayaan budaya</div> <div>(a) Pencatatan kekayaan budaya</div> <div>(b) Penetapan kekayaan budaya</div> <div>(3) Warisan budaya nasional dan dunia</div> <div>(a) Warisan budaya benda</div> <div>(b) Warisan budaya takbenda</div> <div>(4) Diplomasi budaya</div> <div>(a) Diplomasi dalam negeri</div> <div>(b) Diplomasi luar negeri</div> <div>KURIKULUM</div> <div>A Pembinaan kurikulum</div> <div>B Hasil evaluasi penyusunan kurikulum</div>	<div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div>	<div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>DPDK</div>



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<p>A Pengembangan profesi pendidik</p> <p>(1) Peningkatan kompetensi</p> <p>(a) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal</p> <p>(b) Pengembangan profesi pendidikan dasar</p> <p>(c) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah dan kejuruan</p> <p>(2) Sertifikasi</p> <p>(a) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal</p> <p>(b) Pengembangan profesi pendidikan dasar</p> <p>(c) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah dan kejuruan</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	<p>B Pengembangan tenaga kependidikan</p> <p>(1) Program</p> <p>(a) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik</p> <p>(b) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai</p> <p>(2) Evaluasi</p> <p>(a) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik</p> <p>(b) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	<p>C Pengembangan SDM kebudayaan</p> <p>(1) Program</p> <p>(a) Peningkatan kompetensi</p> <p>(b) Sertifikasi</p> <p>(2) Evaluasi</p> <p>(a) Peningkatan kompetensi</p> <p>(b) Sertifikasi</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	<p>D Penjaminan mutu pendidikan</p> <p>(1) Pemetaan mutu</p> <p>(a) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal</p> <p>(b) Penjaminan mutu pendidikan dasar</p> <p>(c) Penjaminan mutu pendidikan menengah dan kejuruan</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
10	(2) Sistem informasi (a) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal (b) Penjaminan mutu pendidikan dasar (c) Penjaminan mutu pendidikan menengah dan kejuruan				
	E Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman (1) Proposal/TOR/KAK	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	F Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	G Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	H Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN A Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film  (1) Perancangan dan produksi (2) Penyiaran dan pengendalian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
11	B Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan <i>web</i>  (1) Perancangan dan produksi (2) Aplikasi dan pengendalian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	C Pengembangan jejaring (1) Pengkajian dan perancangan (2) Pemeliharaan dan pengendalian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN A Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan (1) Validasi dan integrasi data peserta didik	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan	DPDK

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(2) Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan			Kab. Tanah Bumbu	
	B Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran (1) Validasi dan integrasi data satuan pendidikan (2) Validasi dan integrasi data proses pembelajaran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	C Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik (1) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak (2) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dasar	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
12	ARKEOLOGI				
	A Program dan kerja sama penelitian (1) Program (2) Kerja sama	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	B Data dan informasi penelitian (1) Data (2) Informasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
13	MONITORING DAN EVALUASI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
<b>XVIII</b>	<b>URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>				
1	Pemberdayaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda : A Seleksi Pertukaran Pemuda Antara Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara B Paduan suara dalam rangka HUT RI dan hari - hari besar nasional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
2	Peningkatan Wawasan, Iptek dan Imtaq Pemuda : A Peningkatan iman dan taqwa B Sosialisasi kebijakan kepemudaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
3	Peningkatan Kapasitas dan Kreatifitas Pemuda : A Sarjana dan pemuda penggerak pembangunan pendidikan (SP4) B Napak tilas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
4	Kepemimpinan, Kepeloporan, kepramukaan dan Organisasi Kepemudaan  A Pelatihan Paskibraka tingkat Provinsi B Peningkatan wawasan kepaskibrakaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
5	Pengembangan Standarisasi dan Infastruktur Pemuda : A Pelatihan Satgas bencana bagi Pramuka dan pemuda B Kepeloporan pemuda daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
6	Kewirausahaan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda : A Seleksi Paskibraka tingkat Provinsi dan Nasional B Pengembangan sarana kewirausahaan pemuda	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
7	Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga A Pengembangan dan pembibitan olahragawan (Sentra Olahraga) B Pembinaan dan pengembangan PPLP	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
8	Pengembangan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus : A Festival pencak silat/kuntaw tingkat Provinsi B Pelestarian olahraga permainan tradisional C Festival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA) tingkat Provinsi D Peringatan HAORNAS	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
9	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga : A Jalan sehat HUT RI dan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan B Lomba gerak jalan 17,8,45 Km tingkat Provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
10	Pembibitan da Tenaga Olahraga A POPDA Paralympic (Soina) B Pembibitan dan pembinaan olahraga Paralympic Berbakat (PEPARDA) C Kompetisi sepak bola pelajar, tenis lapangan, tenis meja, angkat besi, dayung, judo, taekwondo, bola voli, atlentik dan panahan D Keberangkatan Kontogen pekan olahraga pelajar wilayah /Nasional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
11	(POPWIL/POPONAS) E Pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat (POPDA)  Peningkatan Tenaga dan Organisasi Olahraga : A Grand design keolahragaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
12	Standarisasi Sarana dan Prasarana Olahraga : A Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana B Peningkatan lapangan tenis pelajar Kalimantan Selatan	Rahasia	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	DPDK
<b>XIX</b>	<b>URUSAN AGAMA</b>				
1	Kebijakan Keagamaan Meliputi Kebijakan di Bidang Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Budha, Kerukunan Umat Beragama dan Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Bagian Kesra Setda
2	Bimbingan Masyarakat Islam A Wakaf 1) Permohonan lain tukar menukar Tanah Wakaf (Ruislah)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Bagian Kesra Setda
	2) Permohonan penunjukan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Uang	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Bagian Kesra Setda
	3) Bantuan Pengembangan Wakaf Produktif	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Kesra Setda
	4) Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
	5) Pendataan Wakaf	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Bagian Kesra Setda
	6) Akta Ikrar Wakaf	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Kesra Setda

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	7) Formulir Wakaf  8) Surat Pengesahan Nadzir Wakaf  B Zakat 1) Bimbingan dan pembinaan Lembaga Zakat 2) Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat C Rumah ibadah 1) Bantuan pengelola rumah ibadah  2) Bantuan rumah ibadah  3) Penyuluhan dan bimbingan kemasjidan	Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Terbatas  Biasa/Terbuka	Eselon IV  Eselon IV  Eselon IV  Eselon IV  Eselon III  Eselon IV	mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Bagian Kesra Setda  Bagian Kesra Setda  Bagian Kesra Setda  Bagian Kesra Setda  Bagian Kesra Setda  Bagian Kesra Setda
	D Kerukunan umat beragama 1) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)  E Event Keagamaan 1) Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2) Seleksi Tilawatil Quran (STQ) 3) Dharma Gita 4) Pesparawi F Penyelenggaraan Haji dan Umroh 1) Penetapan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)	Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Terbatas	Eselon IV  Eselon IV  Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Kesra Setda  Bagian Kesra Setda  Bagian Kesra Setda



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6

BUPATI TANAH BUMBU

TTD

H. SUDIAN NOOR

**B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
I		<b>FUNGSI KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PEJABAT NEGARA</b>				
		1 FORMASI PEGAWAI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		a. Usulan dari Unit Kerja SKPD, disertai: 1) analisa jabatan 2) beban kerja				
		b. Usulan Permintaan Formasi kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN				
		c. Persetujuan Menpan dan RB				
		d. Penetapan Formasi ASN				
		e. Penetapan Formasi Khusus				
2		PENGADAAN PEGAWAI				
		a. Proses Penerimaan Pegawai meliputi:	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		1) Pengumuman				
		2) Seleksi Administrasi				
		3) Pemanggilan Peserta Test				
		4) Pelaksanaan Ujian Tertulis				
		5) Keputusan Hasil Ujian				
		6) Wawancara				
		b. Penetapan Pengumuman Kelulusan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		c. Berkas Lamaran yang tidak diterima	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		d. Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		1) Surat Lamaran				
		2) Ijazah				
		3) SKCK				
		4) Kartu Kuning				
		5) Surat Keterangan Kesehatan				
		e. Nota Usul Pengangkatan CASN menjadi ASN lebih dari 2 tahun	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3		f. SK CASN/ASN Kolektif	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		PEMBINAAN KARIR PEGAWAI				
		a. Diklat/Kursus/Magang/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Ijin Belajar Pegawai: 1) Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Ijin 2) Laporan Kegiatan Pengembangan Diri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi PNS	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		d. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		e. Disiplin Pegawai 1) Daftar Hadir	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		f. Berkas Hukuman Disiplin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
4		Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		PENYELESAIAN PENGELOLAAN KEBERATAN PEGAWAI	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
5		MUTASI PEGAWAI				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
6		a. Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Mutasi antar Unit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		b. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		c. Mutasi Keluarga 1) Surat Izin Pernikahan/Perceraian 2) Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian 3) Surat Nikah / Cerai 4) Akte Kelahiran Anak 5) Surat Keterangan Adopsi Anak 6) Surat Keterangan Meninggal Dunia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		d. Usul kenaikan pangkat/golongan/jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		e. Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		f. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		g. Peninjauan Masa Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		h. Berkas Baperjakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		ADMINISTRASI PEGAWAI				
		a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		b. Cuti Besar	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
7		c. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		d. Cuti Alasan Penting	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		e. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		f. Dokumentasi Identitas Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		1) Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu				
		2) Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan				
		3) Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)				
		4) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)				
		g. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		h. Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		KESEJAHTERAAN PEGAWAI				
		a. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		b. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/ASKES	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		c. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		d. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		e. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		f. Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		g. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		h. Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		i. Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
8		PEMBERHENTIAN PEGAWAI TANPA HAK PENSIUN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
9		PERSELISIHAN/SENKETA KEPEGAWAIAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
10		USUL PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PENSIUN PEGAWAI/JANDA/ DUDA DAN ASN YANG MENINGGAL	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
11		BERKAS PERSEORANGAN APARATUR SIPIL NEGARA	Rahasia	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BKD Tanah Bumbu
		a. Berkas Lamaran yang diterima				
		b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya				
		c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN				
		d. SK Pengangkatan CASN				
		e. Hasil Pengujian Kesehatan				
		f. SK Pengangkatan ASN				
		g. SK Peninjauan Masa Kerja				
		h. SK Kenaikkan Pangkat				
		i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan				
		j. SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional				
		k. SK Perpindahan Wilayah Kerja				
		l. SK Perpindahan Antar Instansi				
		m. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)				
		n. Berita Acara Pemeriksaan				
		o. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin ASN				
		p. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		q. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan r. SK Pemberian Uang Tunggu s. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara t. SK Pengalihan ASN u. SK Pemberhentian sebagai ASN v. SK Pemberhentian Sementara w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang x. Surat Keterangan Kembalinya ASN yang dinyatakan hilang y. SK Penggantian Nama z. Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran aa. Akta Nikah/Cerai bb. Akta Kelahiran cc. Isian Formulir PUASN dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ASN dan Jabatan ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus kk. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala ll. Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri mm. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri nn. Kartu Daftar Ulang (Kardaf) ASN oo. Ijazah/Sertifikat pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk rr. Surat Pertimbangan Status ASN ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai ASN tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah uu. SK Pensiun				
12		BERKAS PERSEORANGAN PEJABAT NEGARA	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BKD Tanah Bumbu
13		BERKAS PERSEORANGAN PEJABAT LAINNYA a. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD b. Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan Bawaslu	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BKD Tanah Bumbu

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
14		<p>c. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Lainnya</p> <p>BERKAS PERSEORANGAN KEPALA SKPD</p>	Rahasia	Eselon II	<p>serta merusak kemitraan dan reputasi</p> <p>Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i>, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi</p>	BKD Tanah Bumbu
II		<p><b>FUNGSI KEUANGAN</b></p> <p>A RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)</p> <p>1. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)</p> <p>a. Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Musrenbang</li> <li>- Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)</li> </ul> <p>b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah</p> <p>c. KUA beserta Nota Kesepakatannya</p> <p>d. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)</p> <p>e. Nota Kesepakatan PPA</p> <p>f. Prioritas Plafon Anggaran</p> <p>2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)</p> <p>a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui</p> <p>b. Dokumen RKA-SKPD</p> <p>3. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)</p> <p>a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota Keuangan Pemerintah</li> <li>- Materi RAPBD</li> </ul> <p>b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah</p> <p>c. Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang RaPerda APBD</p> <p>d. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya</p> <p>e. Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD beserta penjabarannya</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu</p>	<p>BPKAD</p> <p>BPKAD</p> <p>BPKAD</p>



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		f. Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD g. Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta penjabarannya h. Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan 1 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2 Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)  3 Dokumen evaluasi pelaksanaan RKPD 4 Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah 5 Prioritas Plafon Anggaran Perubahan b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 1 Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan: Nota Keuangan Pemerintah Materi RAPBD 2 Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3 Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang RaPerda APBD Perubahan 4) Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta 5 Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya 6 Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD Perubahan 7 Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta 8 Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Perubahan 5 Draf Rencana Kerja Pemerinta Kabupaten Klaten (Renja) dan daraf Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta RKA murni dan perubahan sebelum disahkan  6 <i>Exercise/</i> perhitungan dan Rancangan APBD Perubahan Pemerintah Provinsi (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD) 7 <i>Exercise/</i> perhitungan dan Rancangan APBD Perubahan Pemerintah Provinsi (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
			Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
			Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	BPKAD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		8 Rancangan KUA 9 Rancangan PPAS 10 Rancangan PPAS Perubahan 11 Rancangan KUPA 12 DPA-SKPD Provinsi Kalimantan Selatan 13 DPPA-SKPD Provinsi Kalimantan Selatan 14 Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah dan besaran uang yang dihibahkan atas beban APBD 15 DPA PPKD  B PENYUSUNAN ANGGARAN  1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten 2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi 3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah  4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 5 Data penerimaan APBD yang dikelola Bendaharawan Umum Daerah  C PELAKSANAAN ANGGARAN  1. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM, dan Sp2D) : UP, GU, TU, LS	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas  Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas  Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka  Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV  Eselon IV Eselon IV Eselon III  Eselon IV Eselon IV  Eselon III	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	BPKAD  BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD  BPKAD BPKAD BPKAD  BPKAD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>2 Pendapatan</p> <p>a. Pendapatan Asli Daerah</p> <p>1 Surat Ketetapan Pajak Daerah</p> <p>2 Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pajak Hotel</li> <li>-Pajak Restoran</li> <li>-Pajak Hiburan</li> <li>-Pajak Reklame</li> <li>-Pajak Penerangan Jalan</li> <li>-Pajak Mineral Bukan Logam Bantuan</li> <li>-Pajak Parkir</li> <li>-Pajak Air Tanah</li> <li>-Pajak Sarang Burung Walet</li> <li>-PBB Sektor Perdesaan dan perkotaan</li> <li>-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB)</li> </ul> <p>3 Surat Ketetapan Retribusi Daerah</p> <p>4 Bukti Penarikan Retribusi, antara lain :</p> <p>a) Retribusi Jasa Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Retribusi Pelayanan Kesehatan</li> <li>-Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</li> <li>-Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil</li> <li>-Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat</li> <li>-Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</li> <li>-Retribusi Pelayanan Pasar</li> <li>-Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>-Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</li> <li>-Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta</li> <li>-Retribusi Pengujian Kapal Perikanan</li> </ul> <p>b) Retribusi Jasa Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</li> <li>-Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan</li> <li>-Retribusi Tempat Pelelangan</li> <li>-Retribusi Terminal</li> <li>-Retribusi Tempat Khusus Parkir</li> <li>-Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa</li> <li>-Retribusi Penyedotan Kakus</li> <li>-Retribusi Rumah Potong Hewan</li> <li>-Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</li> <li>-Retribusi Penyebrangan di atas Air</li> <li>-Retribusi Pengolahan Limbah Cair</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	<p>tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu</p>	BPKAD

[illegible]

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah				
		5 Dokumen Penatausahaan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Penyediaan Dana (SPD)</li> <li>- Surat Permohonan Pembayaran (SPP)</li> <li>- Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		6 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Kas Umum (BKU)</li> <li>- Buku Kas Pembantu (BKP)</li> <li>- Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek</li> <li>- Rekening Koran Bank</li> <li>- Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi</li> <li>- Bukti penyetoran Pajak</li> <li>- Register Penutupan Kas</li> <li>- Berita Acara Pemeriksaan</li> <li>- Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan Termasuk Arsip Data Komputer (ADK)</li> <li>- Laporan Pendapatan Negara</li> <li>- Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Tiwulan/ Semesteran</li> <li>- Bukti Kas Pengeluaran berikut lampirannya</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		7 Daftar Gaji	Rahasia	Eselon IV	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BPKAD
		8 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		9 Pertanggungjawaban APBD <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah</li> <li>- Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah</li> <li>- Pemandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD oleh DPRD</li> <li>- Jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggung jawaban APBD</li> <li>- Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD terhadap Raperda</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pertanggung jawaban APBD - Permohonan Evaluasi Gubernur tentang Raperda dan Raperbup Pertanggung jawaban APBD - Evaluasi Gubernur tentang Raperda Pertanggunjawaban dan Raperbub APBD  - Perda dan Pergub Pertanggunjawaban APBD 10 Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari : - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Laporan Perubahan Saldo Lebih - Laporan Operasional - Laporan Arus Kas - Laporan perubahan Ekuitas - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		11 Data Belanja Bendaharawan Umum Daerah baik berupa belanja pegawai dan belanja lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		12 Sgi Penguji SP2D yang disampaikan ke Bank Kalsel untuk pencairan dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		13 Dokumen rekonsiliasi dan verifikasi laporan keuangan atas investasi daerah, investasi permanen dan Non permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		14 Dokumen keuangan penyusunan pertanggunjawaban dana transfer Pemerintah Pusat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		15 Laporan Keuangan Pemerintah yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		D PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI				
		1. Dokumen Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri ( <i>Blue Book</i> )	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat	BPKAD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		2. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai ( <i>Green Book</i> )	Terbatas	Eselon III	mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		3. Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan dokumen sejenisnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		4. Dokumen <i>Loan Agreement</i> (PHLN) seperti : <i>Draft Agreement, Legal Opinion</i> , Surat menyurat dengan <i>Lender</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		5. Dokumen Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l. : Usulan Luncuran Dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		6. Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya : - <i>Reimbursement</i> - <i>Direct Payment/ Transfer Procedure</i> - <i>Special Commitment/ L/C Opening</i> - <i>Special Account/ Imprest Fund</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		7. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana ( <i>Payment Advice</i> )	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		8. Dokumen Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		9. <i>Replenishment</i> (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		10 <i>Staff Appraisal Report</i>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		11. <i>Report</i> /Laporan yang terdiri dari: - <i>Progress Report</i> - <i>Monthly Report</i> - <i>Quarterly Report</i>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		12. Laporan Hutang Daerah : - Laporan Pembayaran Hutang Daerah - Laporan Posisi Hutang Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		13. <i>Completion Report/ Annual Report</i>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		14. Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		E PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)				
		1. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan: - Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran - Pejabat Pembuat Komitmen - Kuasa Pengguna Barang/Jasa - Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah - Pejabat Penandatanganan SPM - Bendahara Penerimaan/Pengeluaran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		F SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD)				
		1. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		2. Dokumen Kebijakan Akuntansi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		3. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		4 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		5 Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		G PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN				



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		1. Surat Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara atas Pengguna Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Spesimen Tanda Tangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		2. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya : - SPP-LS, SPP-GU, SP3, Daftar Perincian Penggunaan Dana, SPPR-LS, SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, Bilyet Giro, SPM Nihil - Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta bukti Pendukungnya al : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit - Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		3. Buku Rekening Bank	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		4. Keputusan Pembukuan Rekening	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		5. Pembukuan anggaran terdiri dari : Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan Daftar Pembukuan Pencarian/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencarian (DHP) dan Rekening Koran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		H PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN				
		1. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		2. Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn, Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan, dll	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		I PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA DAN BIAYA BANTUAN PEMILU DARI APBD				
		1. Dokumen Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan PEMILU dari APBD a. Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu b. Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa,	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD

[illegible]

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bank			pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
		3. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank dan lain-lain	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		L PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH				
		1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		2. Pelaksanaan Pengawasan				
		a Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		b Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut				
		c Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		d Laporan Perkembangan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		e Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		f Good Corporate Governance (GCG)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		3. Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah:	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		a Tuntutan Perbendaharaan				
		b Tuntutan Ganti rugi				
III		<b>FUNGSI NON KEUANGAN NON KEPEGAWAIAN</b>				
		A PERENCANAAN				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang /Master Plan (RPJP)</li> <li>b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)</li> <li>c. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>d. Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS)</li> </ul>	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA  BAPPEDA
		2 Program Kerja Tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usulan Unit Kerja beserta data pendukung</li> <li>b. Program Kerja Tahunan Unit Kerja</li> <li>c. Program Kerja Tahunan</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		3. Penetapan / Kontrak Kinerja <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Unit Kerja</li> <li>b. Kepala SKPD</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		4 Laporan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Berkala               <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Harian</li> <li>Laporan Mingguan</li> <li>Laporan Bulanan</li> <li>Laporan Triwulan</li> <li>Laporan Semesteran</li> <li>Laporan Tahunan Unit Kerja</li> <li>Laporan Tahunan SKPD</li> </ul> </li> <li>b. Laporan Insidentil</li> </ul>	Biasa / Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		5 Evaluasi Program <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi program unit kerja</li> <li>b. Evaluasi program SKPD</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		6 Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		7 Konsultasi Perencanaan Pembangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		8 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		9 Aksi Strategis Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rancangan Awal Perencanaan Aksi Strategis</li> <li>b. Rapat pembahasan rancangan awal dengan SKPD</li> <li>c. Sosialisasi SKPD</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Rencana Akhir Perencanaan Aksi Strategis e. Penetapan Perencanaan Aksi Strategis 10 Perencanaan Pendanaan Pembangunan a. Pendanaan APBN b. Pendanaan APBD  B HUKUM	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		1 Program Legislasi a. Program Legislasi b. Bahan / Materi program legislasi daerah 2 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan a. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan b. Rancangan Peraturan Pemerintah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai diundangkan c. Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden, termansuk naskah akademik,rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan d. Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik,rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan  3. Peraturan pimpinan Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/instansi :  Peraturan /Keputusan Gubernur /Bupati/Walikota termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Hukum
		4. Keputusan /Ketetapan Pimpinan Lembaga Negara dan Badan a. Keputusan /Ketetapan Bupati b. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Hukum
		5. Instruksi / Surat Edaran : a. Instruksi / Surat Edaran Gubernur /Bupati/Walikota b. Instruksi / Surat Edaran Pejabat setingkat eselon I dan II termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Hukum
		6. Surat Perintah :	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum

[illegible]

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>vonis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas pembelaan dan bantuan hukum</li> <li>- Telaah hukum dan opini hukum</li> </ul> <p>e. Arbitrase</p> <p>Berkas tentang kasus/sengketa Perburuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis</li> <li>- Berkas pembelaan dan bantuan hukum</li> <li>- Telaah hukum dan opini hukum</li> </ul> <p>f. Sengketa adat</p> <p>g. Kasus-kasus yang berkaitan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)</p> <p>h. Anak kasus pelecehan seksual/kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban</p> <p>13. Perizinan</p> <p>14. Hak atas Kekayaan Intelektual ( HAKI )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hak Cipta</li> <li>b. Hak Paten <ul style="list-style-type: none"> <li>Paten Biasa</li> <li>Paten Sederhana</li> </ul> </li> <li>c. Hak desain Industri</li> <li>d. Hak Rahasia Dagang</li> <li>e. Hak Merk</li> <li>f. DTLS ( Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu )</li> </ul> <p>15. Permohonan Haki yang ditolak ( Hak Cipta, Paten, Desain Industri,</p> <p>C ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN</p> <p>1. Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan</li> <li>b. Perubahan</li> <li>c. Pembubaran</li> </ul> <p>2. Uraian Jabatan dan Tata Kerja</p> <p>3. Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Ortala</p> <p>Bagian Ortala</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		4. Evaluasi Kelembagaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Ortala
		D KEARSIPAN				
		1 Kebijakan Kebijakan tentang pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
		2 Pembinaan kearsipan A) Bina Arsiparis 1) Bimbingan konsultasi arsiparis	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
		2) Penilaian Arsiparis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
		3) Pemilihan arsiparis teladan a) Penyelenggaraan b) Berkas penetapan arsiparis teladan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
		4) Database arsiparis	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
		B) Bimbingan dan Konsultasi (Sosialisasi, Seminar, Lokakarya, Workshop) 1) Penerapan sistem dalam penyelenggaraan kearsipan 2) Penggunaan sarana dan prasarana kearsipan 3) Unit kearsipan 4) Sumber daya Manusia	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
		C) Supervisi dan Evaluasi 1) Perencanaan 2) Pelaksanaan 3) Laporan hasil supervisi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
		D) Data Base Bimbingan, Konsultasi dan Supervisi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
		E) Fasilitasi Kearsipan 1) SDM kearsipan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		2) Prasarana dan sarana F) Unit Kearsipan Teladan 1) Penyelenggaraan 2) Berkas penetapan Unit kearsipan teladan G) Jadwal Retensi Arsip H) Tata Naskah Dinas (TND) I) Klasifikasi arsip J) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (KKAAD)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
		3 Pengelolaan Arsip A) Pengelolaan arsip Dinamis 1) Penciptaan a) Pencatatan - Buku agenda - Kartu kendali - Lembar pengantar / buku ekspedisi. 2) Penggunaan a) Pengklasifikasian Pengamanan dan akses arsip b) Peminjaman 3) Pemeliharaan a) Pemberkasan - daftar arsip Aktif b) Penataan Arsip inaktif - Pengaturan fisik - Pengolahan informasi arsip - Penyusunan daftar arsip inaktif c) Penyimpanan Arsip - Skema penyimpanan arsip aktif dan inaktif - Peta lokai penyimpanan arsip - pengamanan d) Alih Media - Kebijakan alih alih media - Autentikasi - Berita acara - Daftar arsip yang alihmediakan e) Program arsip vital	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
			Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
			Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		4) Autentikasi Arsip Dinamis <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pembuktian autensitas</li> <li>b) Pendapat tenaga ahli</li> <li>c) Pengujian</li> <li>d) Penetapan autensitas arsip statis/surat pernyataan penciptaan arsip</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
		5) Penyusutan <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pemindahan Arsip inaktif               <ul style="list-style-type: none"> <li>- berita acara pemindahan</li> <li>- daftar arsip yang dipindahkan</li> </ul> </li> <li>b) Pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna               <ul style="list-style-type: none"> <li>- penilaian panitia penilai</li> <li>- permintaan persetujuan (kepala ANRI, Kepala lembaga kearsipan)</li> <li>- penetapan arsip yang dimusnahkan</li> <li>- berita acara pemusnahan</li> <li>- daftar arsip yang dimusnahkan</li> </ul> </li> <li>c) Penyerahan arsip Statis               <ul style="list-style-type: none"> <li>- pembentukan panitia penilai</li> <li>- notulen rapat penilai</li> <li>- surat pertimbangan panitia penilai</li> <li>- surat persetujuan dari kepala LKD</li> <li>- surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh dan dapat dipergunakan</li> <li>- keputusan penetapan penyerahan</li> <li>- berita acara penyerahan arsip</li> <li>- daftar arsip yang diserahkan</li> </ul> </li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
		6) Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Database pengolahan arsip aktif</li> <li>b) Database pengolahan arsip inaktif</li> <li>c) Database arsip Statis</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
		B) Pengelolaan Arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Akuisisi               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Monitoring fisik dan dan daftar</li> <li>b) Verifikasi terhadap daftar arsip</li> <li>c) Menetapkan status arsip statis</li> <li>d) persetujuan untuk penyerahan</li> <li>e) penetapan arsip yang diserahkan</li> <li>f) berita acara penyerahan arsip</li> <li>g) daftar arsip yang diserahkan</li> </ul> </li> <li>2) Sejarah Lisan               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) administrasi pelaksanaan sejarah lisan</li> </ul> </li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Hasil wawancara sejarah lisan <ul style="list-style-type: none"> <li>- berita acara wawancara sejarah lisan</li> <li>- laporan kegiatan</li> <li>- hasil wawancara ( kaset / CD ) dan transkrip</li> </ul> </li> <li>3) Daftar Pencarian Arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pengumuman</li> <li>b) akuisisi daftar pencairan arsip statis</li> </ul> </li> <li>4) Penghargaan dan imbalan</li> <li>5) Pengolahan <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menata informasi</li> <li>b) Menata fisik</li> <li>c) menyusun sarana bantu temu balik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guide</li> <li>- Daftar arsip statis</li> <li>- inventaris arsip statis</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>6) Preserfasi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Preventif <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyimpanan</li> <li>- pengendalian hama terpadu</li> <li>- Reproduksi ( ahli media ) <ul style="list-style-type: none"> <li>* Berita acara alih media</li> <li>* Daftar arsip yang dialihmediakan</li> </ul> </li> <li>- perencanaan penanggulangan bencana</li> </ul> </li> <li>b) Kuratif <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perawatan arsip</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>7) a) Pembuktian autensitas <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Pendapat tenaga ahli</li> <li>c) Pengujian</li> <li>d) Penetapan autensitas arsip statis/surat pernyataan</li> </ul> </li> <li>8) Akses Arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Layanan arsip</li> <li>b) Penerbitan naskah sumber <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasidan proses penyusunan</li> <li>- Hasil naskah sumber arsip</li> </ul> </li> <li>c) Pameran arsip</li> </ul> </li> <li>9) Jasa Kearsipan <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Konsultasi kearsipan</li> <li>b) Manual kearsipan</li> <li>c) Penata arsip</li> <li>d) Otomasi kearsipan</li> <li>e) Penyimpanan arsip</li> <li>f) Perawatan dan pemeliharaan arsip</li> <li>g) Database jasa kearsipan</li> </ul> </li> </ul>				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		E KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN				
		1. Telekomunikasi : Administrasi penggunaan / langganan peralatan telekomunikasi meliputi : telepon,radio,teleks,TV kabel dan internet	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
		2. Perjalanan Dinas a. Dalam Negeri b. Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
		3. Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
		4. Risalah/Notulen Rapat a. Rapat staf b. Rapat pimpinan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
		5. Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
		6. Pengurusan kendaraan dinas: a. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas b. Pemeliharaan dan perbaikan c. Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
		7. Pemeliharaan gedung dan taman : a. Pertamanan /landscaping b. Penghijauan c. Perbaikan gedung d. Perbaikan rumah dinas /wisma e. Kebersihan gedung dan taman	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
		8. Pengelolaan jaringan listrik, air, telepon, dan komputer : a. Perbaikan /pemeliharaan b. Pemasangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
		9. Ketertiban dan keamanan a. Pengamanan,penjagaan,dan pengawalan terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas : 1). Daftar nama satuan pengamanan 2). Daftar jaga / daftar piket 3). Catatan gangguan / pelanggaran /kejadian 4). Surat ijin keluar masuk orang atau barang b. Laporan ketertiban dan keamanan 1). Kehilangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum

[illegible]

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>e. Hubungan dengan media massa :</p> <p>1). Siaran pers/konferensi pers/press release</p> <p>2). Kunjungan wartawan /peliputan</p> <p>3). Wawancara</p> <p>5. Dengar pendapat/hearing DPR</p> <p>6. Bahan/materi pidato/sidang MPR, DPR, DPD, kabinet, DPRD, Muspida Provinsi/kabupaten/kota</p> <p>7. Naskah pidato sambutan yang belum dibacakan</p> <p>8. Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal</p> <p>9. Publikasi melalui media cetak maupun elektronik</p> <p>10. Pameran/sayembara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan</p> <p>11. Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan</p> <p>12. Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar</p> <p>G PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN</p> <p>1 Kebijakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan serta pendedayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi : kelembagaan, sumberdaya dan jaringan</p> <p>2 Penelitian dan pengkajian</p> <p>a Rencana Kerja</p> <p>- Master plan / rencana strategis</p> <p>- Rencana kerja tahunan : proposal / <i>idea concept paper</i> (ICP)</p> <p>- Berkas / kontrak MoU kerjasama / material transfer agreement (MTA)</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon III</p> <p>Eselon III</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>Diskominfo</p> <p>Diskominfo</p> <p>Diskominfo</p> <p>Diskominfo</p> <p>Diskominfo</p> <p>Diskominfo</p> <p>Diskominfo</p> <p>Diskominfo</p> <p>Diskominfo</p> <p>Diskominfo</p> <p>Diskominfo</p> <p>Diskominfo</p> <p>Diskominfo</p> <p>Diskominfo</p> <p>BAPPEDA</p> <p>BAPPEDA</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjanjian penelitian</li> <li>b Administrasi penelitian : surat tugas / surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen / formulir</li> <li>c Pelaksanaan penelitian / pengkajian <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur / petunjuk</li> <li>- Data primer</li> <li>- Log Book</li> <li>- Studi kelayakan</li> <li>- Instrumen penelitian</li> <li>- Pelaksanaan survey</li> <li>- Laporan hasil pendataan / survey</li> <li>- Analisis / pengolahan data</li> </ul> </li> <li>d Hasil penelitian / pengkajian / rekomendasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan hasil penelitian dan hasil luaran</li> <li>- Rekomendasi</li> </ul> </li> <li>e Hasil penelitian dan pengkajian hasil jasa layanan</li> </ul>				
		3 Pengembangan dan Inovasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Kerja</li> <li>- Administrasi pengembangan dan inovasi</li> <li>- Pelaksanaan</li> <li>- Hasil pengembangan / inovasi</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		4 Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replika/prototipe hasil penelitian/pengkajian/perekayasa/pengembangan/inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		5 Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		6 Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi <ul style="list-style-type: none"> <li>a Promosi</li> <li>b Permayarakatan</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		7 Pembinaan penelitian/pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknonologi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		8 Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		9 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		10 Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi  a. Penerbitan: jurnal / buletin ilmiah, bahan publikasi khusus b. Leaflet dan booklet c. Kamus istilah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		11 Hak atas kekayaan intelektual (HAKI)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		12 Forum Komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		13 Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK a. Jasa laboratorium pengujian b. Jasa teknologi produksi c. Jasa studi d. Jasa penyewaan peralatan e. Jasa perbantuan tenaga ahli / profesi f. Jasa sertifikasi / kalibrasi dan sertifikasi g. Buku rekaman barang yang diuji / dikalibrasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		14 Sertifikasi personil peneliti	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		15 Akreditasi laboratorium	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		H PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
		1. Pedoman-pedoman kediklatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		2. Kurikulum-kurikulum diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		3. Modul-modul diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		4. Panduan fasilitator	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		5. Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		6. Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		7. Akreditasi Lembaga Diklat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat permohonan akreditasi</li> <li>- Laporan hasil verifikasi lapangan</li> <li>- Berita acara rapat verifikasi</li> <li>- Berita acara rapat tim penilai</li> <li>- Surat keputusan penetapan akreditasi</li> <li>- Sertifikasi akreditasi</li> <li>- Laporan akreditasi lembaga diklat</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		8. Sertifikasi sumber daya manusia kediklatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat permohonan sertifikasi</li> <li>- Laporan hasil verifikasi lapangan</li> <li>- Berita acara rapat verifikasi</li> <li>- Berita acara rapat Tim penilai</li> <li>- Surat keputusan penetapan sertifikasi</li> <li>- Sertifikat sertifikasi</li> <li>- Laporan sertifikasi individual</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		9. Sistem informasi diklat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data lembaga diklat</li> <li>- Data prasarana diklat</li> <li>- Data sarana Diklat</li> <li>- Data pengelola diklat</li> <li>- Data penyelenggaraan diklat</li> <li>- Data widyaiswara</li> <li>- Data program diklat</li> <li>- Data peserta diklat</li> </ul>	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD  BKD  BKD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		10. Registrasi sertifikat STTPL peserta diklat a. Surat permohonan kode registrasi b. Buku registrasi c. Surat penyampaian kode registrasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		11. Rencana tahunan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		12. Rencana penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		13. Penyelenggaraan diklat - Surat pemanggilan peserta - Surat keputusan tim penyelenggaraan diklat - Surat keputusan tim pengajar diklat - Panduan diklat - Laporan panitia penyelenggaraan diklat - Sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat - Daftar peserta diklat - Bahan ajar diklat - Daftar hadir peserta diklat - Daftar hadir widyaiswara - Formulir evaluasi diklat - Formulir evaluasi widyaiswara - Hasil formulasi evaluasi peserta diklat - Sertifikat/ STTPL - Sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		14. Laporan penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		15. Saran/Rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		16. Evaluasi penyelenggaraan diklat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		17 Evaluasi alumni pasca diklat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		I KEPUSTAKAAN				
		1. Deposit Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP
		a. Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				
		b. Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman				
		c. Terbitan Internasional dan Regional				
		d. Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				
		e. Bibliografi dan Katalog				
		f. - Bibliografi Nasional Indonesia (BNI)				
		- Bibliografi Daerah (BD)				
		- Katalog Induk Nasional (KIN)				
		Katalog Induk Daerah (KID)				
		Katalog Dalam Terbitan (KDT)				
		g. Pendaftaran Nomor <i>Internasional Standard Book Number</i> (ISBN)				
		h. Pendaftaran Nomor <i>Internasional Standard Music Number</i> (ISMN)				
		2. Pengembangan Koleksi				
		a. Akusisi				
		- Pembelian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP
		- Hibah	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		- Hadiah	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		- Tukar Menukar	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		- Implementasi Undang-Undang KCKR	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP
		- Terbitan Internal	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		- Pendistribusian bahan pustaka surplus	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		- Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		- Dokumen pengadaan bahan pustaka sebelum proses lelang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP
		b. Pengolahan Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP
		c. Pangkalan Data Katalog Koleksi	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		3. Jasa Perpustakaan dan Informasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.	DISPERSIP
		a. Keanggotaan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Sirkulasi</li> <li>c. Referensi</li> <li>d. Alih Aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara</li> <li>e. Kerjama Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- MoU</li> <li>- Perjanjian kerjasama</li> <li>- Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional</li> </ul> </li> <li>f. Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan situs web</li> <li>- Pengembangan kemas ulang informasi multimedia</li> <li>- Pengembangan program aplikasi perpustakaan</li> <li>- Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital</li> </ul> </li> <li>g. Pangkalan Data Layanan Perpustakaan</li> </ul>			Tanah Bumbu	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Preservasi Bahan Pustaka <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konservasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perawatan Bahan Perpustakaan</li> <li>- Perbaikan Bahan Perpustakaan</li> <li>- Penjilidan Bahan Perpustakaan</li> </ul> </li> <li>b. Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)</li> <li>c. Transformasi Digital</li> <li>d. Kurasi Digital</li> </ul> </li> <li>5. Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perpustakaan Umum</li> <li>- Perpustakaan Khusus</li> <li>- Perpustakaan Sekolah</li> <li>- Perpustakaan Perguruan Tinggi</li> </ul> </li> <li>b. Akreditasi Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permintaan akreditasi</li> <li>- Pemberian akreditasi</li> <li>- Pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi</li> </ul> </li> <li>c. Pangkalan Data Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Pokok Perpustakaan</li> <li>- Perpustakaan Berbasis Wilayah</li> </ul> </li> <li>d. Pemasyarakatan Minat Baca <ul style="list-style-type: none"> <li>Organisasi Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum Perpustakaan Umum</li> <li>- Forum Perpustakaan Khusus</li> <li>- Forum Perpustakaan Sekolah</li> <li>- Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Masyarakat Minat Baca</li> <li>- Organisasi Perpustakaan Lainnya</li> </ul> <p>6. Pengembangan Pustakawan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikasi Tenaga Perpustakaan</li> <li>b. Pembinaan Tenaga Perpustakaan</li> <li>c. Penerbitan Jurnal</li> <li>d. Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Penilai Pusat</li> <li>- Tim Penilai Unit Kerja</li> <li>- Tim Penilai Instansi</li> <li>- Tim Penilai Provinsi</li> </ul> </li> <li>e. Masyarakat</li> <li>f. Evaluasi Tenaga Perpustakaan</li> <li>g. Pangkalan data Tenaga Perpustakaan</li> <li>h. Pangkalan data Tim Penilai Pustakawan</li> </ul> <p>J TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</p> <p>1. Kebijakan</p> <p>Kebijakan sumber daya dan perangkatan Pos dan Informatika, penyelenggaraan Pos dan Informatika</p> <p>A) Standarisasi perangkat Pos dan Informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Teknik Pos dan Telekomunikasi</li> <li>2) Teknik komunikasi radio</li> <li>3) Penerapan standar Pos dan Telekomunikasi</li> <li>4) Kualitas pelayanan dan harmonisasi standar</li> <li>5) Standar dan audit perangkat lunak</li> </ul> <p>2. Sumber Daya Dan Perangkat</p> <p>A) Penataan Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Alokasi spektrum dinas <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Alokasi dinas tetap</li> <li>b) Alokasi dinas bergerak darat</li> </ul> </li> <li>2 Alokasi spektrum Non dinas tetap dan bergerak darat <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Alokasi dinas penyiaran</li> <li>b) Alokasi dinas penerbangan, maritim dan satelit</li> </ul> </li> <li>3 Orbit satelit <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Notifikasi dan penataan Filinf Satelit</li> <li>b) Tata kelola hubungan antar penyelenggara</li> </ul> </li> <li>4) Ekonomi sumber daya</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP
		<p>1. Kebijakan</p> <p>Kebijakan sumber daya dan perangkatan Pos dan Informatika, penyelenggaraan Pos dan Informatika</p> <p>A) Standarisasi perangkat Pos dan Informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Teknik Pos dan Telekomunikasi</li> <li>2) Teknik komunikasi radio</li> <li>3) Penerapan standar Pos dan Telekomunikasi</li> <li>4) Kualitas pelayanan dan harmonisasi standar</li> <li>5) Standar dan audit perangkat lunak</li> </ul> <p>2. Sumber Daya Dan Perangkat</p> <p>A) Penataan Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Alokasi spektrum dinas <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Alokasi dinas tetap</li> <li>b) Alokasi dinas bergerak darat</li> </ul> </li> <li>2 Alokasi spektrum Non dinas tetap dan bergerak darat <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Alokasi dinas penyiaran</li> <li>b) Alokasi dinas penerbangan, maritim dan satelit</li> </ul> </li> <li>3 Orbit satelit <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Notifikasi dan penataan Filinf Satelit</li> <li>b) Tata kelola hubungan antar penyelenggara</li> </ul> </li> <li>4) Ekonomi sumber daya</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
		<p>1. Kebijakan</p> <p>Kebijakan sumber daya dan perangkatan Pos dan Informatika, penyelenggaraan Pos dan Informatika</p> <p>A) Standarisasi perangkat Pos dan Informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Teknik Pos dan Telekomunikasi</li> <li>2) Teknik komunikasi radio</li> <li>3) Penerapan standar Pos dan Telekomunikasi</li> <li>4) Kualitas pelayanan dan harmonisasi standar</li> <li>5) Standar dan audit perangkat lunak</li> </ul> <p>2. Sumber Daya Dan Perangkat</p> <p>A) Penataan Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Alokasi spektrum dinas <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Alokasi dinas tetap</li> <li>b) Alokasi dinas bergerak darat</li> </ul> </li> <li>2 Alokasi spektrum Non dinas tetap dan bergerak darat <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Alokasi dinas penyiaran</li> <li>b) Alokasi dinas penerbangan, maritim dan satelit</li> </ul> </li> <li>3 Orbit satelit <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Notifikasi dan penataan Filinf Satelit</li> <li>b) Tata kelola hubungan antar penyelenggara</li> </ul> </li> <li>4) Ekonomi sumber daya</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Analisa industri dan ekonomi</li> <li>b) Penanganan izin pria</li> <li>5) Harmonisasi teknik spektrum <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Teknik spektrum antar lembaga</li> <li>b) Harmonisasi dan notifikasi terestrial</li> </ul> </li> <li>B) Operasi Sumber Daya <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pelayanan spektrum dinas <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pelayanan dinas tetap</li> <li>b) Pelayanan dinas bergerak darat</li> </ul> </li> <li>2) Pelayanan spektrum Non Dinas <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pelayanan dinas penyiaran</li> <li>b) Pelayanan dinas penerbangan, maritim dan satelit</li> </ul> </li> <li>3) Sertifikasi operator radio <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pelayanan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk</li> <li>b) Pelayanan operator radio</li> </ul> </li> <li>4) Penanganan biaya <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penanganan piutang biaya hak penggunaan frekuensi radio</li> <li>b) Analisa dan evaluasi biaya hak penggunaan frekuensi radio</li> </ul> </li> <li>5) Konsultasi dan data operasi sumber daya <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Konsultasi dan informasi sumber daya</li> <li>b) Pengelolaan data operasi sumber daya</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>C) Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelolaan sistem monitoring spektrum <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Rancang bangun teknologi monitoring spektrum</li> <li>b) Pemeliharaan sistem informasi monitoring spektrum</li> </ul> </li> <li>2) Pengelolaan sistem informasi manajemen spektrum <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Rancang bangun sistem informasi manajemen spektrum</li> <li>b) Pemeliharaan sistem informasi manajemen spektrum</li> </ul> </li> <li>3) Monitoring dan Penertiban Spektrum <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Bergerak Tetap dan</li> <li>b) Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Non Bergerak Tetap</li> </ul> </li> <li>4) Monitoring dan Penertiban <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika</li> <li>b) Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. Penyelenggaraan Pos Dan Informatika <ul style="list-style-type: none"> <li>A) Pos <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Layanan dan Penerapan Pos Universal <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Layanan</li> <li>b) Penerapan Layanan</li> </ul> </li> <li>2) Layanan Pos Komersial</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>DISKOMINFO</p> <p>DISKOMINFO</p> <p>DISKOMINFO</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a) Tata Kelola Layanan b) Data dan Informasi Layanan 3) Prangko dan Filateli a) Prangko b) Filateli 4) Iklim Usaha Pos a) Pos Universal b) Pos Komersial 5) Pentarifan Pos a) Layanan Pos Universal a) Pos Komersial B) Telekomunikasi 1) Layanan Jaringan Telekomunikasi a) Akses b) Backbone 2) Layanan Jasa Telekomunikasi a) Jasa Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi Elektronik b) Jasa Multimedia 3) Penomoran telekomunikasi dan informatika a) Penomoran Telekomunikasi b) Penomoran Informatika 4) Tarif dan interkoneksi a) Tarif telekomunikasi b) Interkoneksi telekomunikasi 5) Kelayakan sistem telekomunikasi a) Pelayanan sistem jaringan dan jasa b) Penerapan teknologi telekpmunikasi C) Penyiaran 1) Pemetaan dan database a) Pemetaan penyelenggaraan radio dan televisi b) Database penyelenggaraan radio dan televisi 2) Verifikasi dan uji coba siaran a) Verifikasi dan uji coba siaran radio b) Verifikasi penyelenggaraan radio dan Televisi 3) Radio a) Lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran radio b) Lembaga penyiaran stwasra radio 4) Televisi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO 1
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a) Lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran berlangganan b) Lembaga penyiaran swasta televisi 5) Iklim usaha penyiaran a) Penyusunan dan evaluasi regulasi penyiaran b) Penerapan kewajiban lembaga penyiaran D) Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal 1) Telekomunikasi khusus, penyiaran publik dan kewajiban universal  a) Analisa penyelenggaraan b) Pelayanan 2) Telekomunikasi khusus Non Pemerintah a) Analisa penyelenggaraan b) Pelayanan 3) Layanan khusus penyiaran a) Publik radio b) Publik televisi 4) Pelayanan kewajiban universal a) Perencanaan pembangunan b) Monitoring dan evaluasi 5) Pengembangan infrastruktur a) Perencanaan infra struktur b) Analisa ekonomis infastruktur E) Pengendalian Pos dan Informasi 1) Monitoring dan evaluasi Pos a) Monitoring b) Evaluasi 2) Monitoring dan evaluasi jaringan dan telekomunikasi a) Monitoring b) Evaluasi 3) Monitoring dan evaluasi jasa telekomunikasi a) Monitoring b) Evaluasi 4) Monitoring dan evaluasi penyiaran a) Monitoring b) Evaluasi 5) Pencegahan dan penertiban a) Pencegahan b) Penertiban 4. Aplikasi Informatika A) e-Government	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	DISKOMINFO



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		1) Tata kelola e-Government a) Program e-Government b) Evaluasi e-Government 2) Teknologi dan infastruktur e-Government a) Teknologi e-Government a) Infastruktur e-Government 3) Interoperabilitas dan interkoneksi-tas e-Government a) Interoperabilitas e-Government b) Interkoneksi-tas e-Government 4) Aplikasi layanan pemerintahan a)Aplikasi layanan pemerintahan pusat b) Aplikasi layanan pemerintahan daerah 5) Aplikasi layanan publik a) Inisiasi aplikasi layanan publik b) Fasilitas aplikasi layanan publik B) e-Businnes 1) Tata kelola e-Businnes a) Program e-Businnes b) Evaluasi e-Businnes 2) Teknologi dan infastruktur e-Businnes a) Teknologi e-Businnes b) Infrastruktur e-Businnes 3) Interoperabilitas dan interkoneksi-tas e-Businnes a) Interoperabilitas e-Businnes b) Interkoneksi-tas e-Businnes 4) Aplikasi layanan e-Businnes a) Bidang usaha dan mikro b) Bidang usaha menengah dan besar C) Pemberdayaan Informatika 1) Pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan a) Perancangan model b) Penerapan model 2) Pemberdayaan informatika masyarakat pedesaan a) Pengembangan model b) Penerapan model 3) Pemberdayaan informatika masyarakat perbatasan dan pulau a) Pengembangan model b) Penerapan model 4) Pemberdayaan informatika masyarakat khusus a) Pengembangan model	Biasa/Terbuka	Eselon IV	mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
					Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b) Penerapan model D) Pemberdayaa Industri Informatika 1) Industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika a) Pemberdayaan b) Promosi 2) Industri perangkat informatika pengguna a) Pemberdayaan b) Pengembangan produk 3) Industri perangkat lunak a) Pemberdayaan b) Pengembangan produk 4) Industri konten multimedia a) Pemberdayaan b) Pengembangan produk E) Keamanan Informasi 1) Tatakelola keamanan informasi a) Kelembagaan b) Manajemen risiko 2) Teknologi keamanan informasi a) Infra Struktur b) Aplikasi 3) Monitoring evaluasi dan tanggapan darurat keamanan informasi a) Infra Struktur b) Aplikasi 4) Penyelidikan dan penindakan a) Monitoring dan evaluasi keamanan informasi b) Tanggap darurat peristiwa keamanan informasi 5) Budaya keamanan informasi a) Penyidikan b) Penindakan 5. Informasi Dan Komunikasi Publik A) Komunikasi Publik 1) Komunikasi publik a) Program komunikasi publik b) Monitoring dan evaluasi 2) Pengelolaan opini publik a) Pengumpulan opini publik b) Pengolahan opini publik 3) Layanan komunikasi publik a) Pengumpulan data	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
			Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Pengolahan data</li> <li>B) Pengolahan dan Penyediaan Informasi <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Informasi layanan hukum dan keamanan <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Politik dan keamanan</li> <li>b) Hukum dan hak asasi manusia</li> </ul> </li> <li>2) Informasi perekonomian <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Keuangan, perbankan dan jasa</li> <li>b) Industri dan perdagangan</li> </ul> </li> <li>3) Informasi kesejahteraan rakyat <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Agama, sosial dan budaya</li> <li>b) Pendidikan kesehatan dan lingkungan hidup</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>C) Pengelolaan Media Publik <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Media cetak</li> <li>2) Media online</li> <li>3) Media luar ruang dan audio visual</li> </ul> </li> <li>D) Kemitraan Komunikasi <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kemitraan komunikasi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program kemitraan pemerintahan dan lembaga negara</li> <li>b) Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>2) Kemitraan media dan dunia usaha <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program kemitraan media dan dunia usaha</li> <li>b) Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>3) Kemitraan organisasi kemasyarakatan dan profesi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program kemitraan organisasi kemasyarakatan dan profesi</li> <li>b) Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>E) Layanan Informasi Internasional <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Layanan informasi media asing <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program layanan informasi media asing</li> <li>b) Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>2) Layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga</li> <li>b) Monitoring dan evaluasi layanan informasi</li> </ul> </li> <li>3) Layanan informasi masyarakat luar negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program layanan informasi</li> <li>b) Monitoring dan evaluasi layanan informasi</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>6. Pusat Data Dan Sarana Informatika <ul style="list-style-type: none"> <li>A) Infrastruktur Informatika <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jaringan <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Login administrator website/kode akses elektronik</li> <li>b) Setting konfigurasi network</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon III</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>DISKOMINFO</p> <p>DISKOMINFO</p> <p>DISKOMINFO</p> <p>DISKOMINFO</p> <p>DISKOMINFO</p> <p>DISKOMINFO</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c) Segment network d) Security network e) Management bandwidth f) Lokasi server g) Internet protocol/IP address private 2) Piranti teknologi informatika  3) Keamanan informasi  B) Sistem dan Data 1) Portal dan konten  2) Pengumpulan dan pengolahan data a) Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi) b) Data administrasi radio dan TV c) Sistem manajemen database 3) Pengembangan aplikasi  C) Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat 1) Pelayanan informasi a) Media baru b) Media konvensional c) Dokumentasi dan perpustakaan 2) Hubungan masyarakat a) Publikasi b) Analisis berita dan pengelolaan opini publik c) Hubungan dan eksternal 3) Bimbingan teknis Bimbingan sumberdaya perangkat Pos dan Informatika, penyelenggaraan Pos dan Informasi dan komunikasi publik, data dan sarana informasi dan humas 4) Evaluasi	Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Terbatas  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka	Eselon IV  Eselon IV  Eselon IV  Eselon III  Eselon IV  Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO  DISKOMINFO  DISKOMINFO DISKOMINFO  DISKOMINFO

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Evaluasi sumber daya dan perangkat Pos dan Informatika, penyelenggaraan Pos dan Informasi aplikasi dan komunikasi publik, data dan sarana informatika, informasi dan humas				
		K. PERSANDIAN				
		1. Kebijakan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
		A) Kebijakan: pembinaan dan pengendalian persandian, pengamanan persandian				
		1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan				
		2) Penyiapan kebijakan				
		3) Perumusan kebijakan				
		4) Masukan dan dukungan kebijakan				
		5) Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)				
		2. Pembinaan Dan Pengendalian Persandian				
		A) Pembinaan dan pengendalian sumber daya manusia, materiil dan				
		1) SDM	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
		a) Data personel Sandi				
		b) Pembinaan Personel Sandi				
		c) Pengawasan dan Pengendalian				
		2) Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi				
		a) Data Materiil dan JKS	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
		b) Analisa Kebutuhan Materiil dan Jaringan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		Sandi				
		c) Perangkat Khusus Persandian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
		d) Data Spesifikasi Sarana Komunikasi Sandi	Terbatas	Eselon III		
		e) Perangkat Keras Persandian/Mesin Sandi	Terbatas	Eselon III		
		f) Perangkat Lunak Sandi	Terbatas	Eselon III		
		3) Akreditasi dan Sertifikasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
		a) Akreditasi Diklat				
		b) Sertifikasi Alat				
		3. Pengamanan Persandian				
		A) Pengamanan sinyal: teknik sandi dan krypto	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		1) Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi) 2) Pelaporan B) Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi 1) Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi) 2) Pelaporan C) Meteriil sandi: sistem dan peralatan 1) Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi)  2) Kunci Sistem Sandi 3) Data Penempatan Jaringan, Peralatan Sandi, dan Tempat Kegiatan Sandi 4) Pelaporan  4. Pengkajian Persandian : Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi A) Perencanaan Pengkajian B) Administrasi Pengkajian C) Pelaksanaan D) Pelaporan  L PENGAWASAN  1. Rencana Pengawasan a. Rencana strategis pengawasan b. Rencana kerja tahunan  c. Rencana kinerja tahunan d. Penetapan kinerja tahunan e. Rakor pengawasan tingkat Provinsi 2. Pelaksanaan Pengawasan a. Laporan hasil audit (LHA), Laporan hasil pemeriksaan (LHP),Laporan	Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Terbatas Terbatas  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka   Terbatas  Terbatas	Eselon IV  Eselon IV  Eselon III Eselon III  Eselon IV  Eselon IV   Eselon III  Eselon III	mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	DISKOMINFO  DISKOMINFO  DISKOMINFO DISKOMINFO  DISKOMINFO  DISKOMINFO   Inspektorat  Inspektorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL) b. Laporan hasil audit (LHA),Laporan hasil pemeriksaan (LHP),Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO),Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Laporan Akuntan (LA),Laporan Auditor Independen (LAI),yang tidak c. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut d. Laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat e. Laporan Pemutakhiran Data f. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara g. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan <i>Review</i> Pemerintah Prov. Kalsel h. Good Corporate Governance (GCG)			tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	

BUPATI TANAH BUMBU

ttd.

H. SUDIAN NOOR